

**PRAKTIK *AUTHORITARIAN GENDERWASHING* DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK PEREMPUAN INDIA
DI BAWAH KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI 2019-2024**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

NADYA FAKHIRAH NUR FAHLEPI

22323159

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**PRAKTIK *AUTHORITARIAN GENDERWASHING* DALAM
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN POLITIK PEREMPUAN INDIA
DI BAWAH KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI 2019-2024**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

NADYA FAKHIRAH NUR FAHLEPI

22323159

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

PRAKTIK *GENDERWASHING* DALAM PEMERINTAHAN INDIA DI BAWAH KEPEMIMPINAN NARENDRA MODI

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

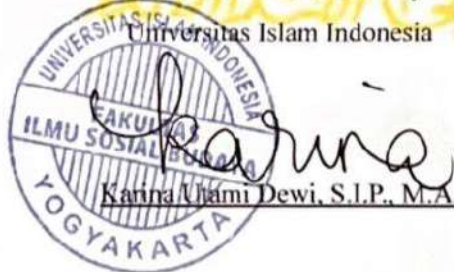
Pada Tanggal

26 Februari 2026

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia



Dewan Penguji

Tanda Tangan

- 1 Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.
- 2 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.
- 3 Alfredha Shinta Putri, S.I.P., M.H.I.

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Yogyakarta, 26 Februari 2026



The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow revenue stamp. The stamp is labeled '10000' and 'METERAI TEMPORER'. Below the stamp, the text 'C433CANX280179365' is visible. The signature is written in a cursive style.

Nadya Fakhirah Nur Fahlepi

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR FIGUR	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Cakupan Penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	11
1.7 Argumen Sementara	15
1.8 Metode Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB II KONTEKS POLITIK DAN KEBIJAKAN GENDER DI INDIA ERA NARENDRA MODI	18
2.1 Praktik Politik Otoriter Modi	18
2.1.1 Konsolidasi Kekuasaan dan Pelemahan Institusi Demokratis.....	18
2.1.2 Nasionalisme Hindu dan Politik Identitas	20
2.1.3 Pembatasan Ruang Sipil dan Kebebasan Pers.....	22
2.2. Pemenuhan Status Hak Perempuan di India	24
2.2.1 Kerangka Normatif Hak Perempuan: Perspektif Internasional dan Nasional	24
2.2.2 Pemenuhan Hak Perempuan Periode 2019-2024	26
2.2.3 Kesenjangan Implementasi dan Tantangan Struktural	30
BAB III KONTEKS POLITIK DAN KEBIJAKAN GENDER DI INDIA ERA NARENDRA MODI	32
3.1 Procedure-Based Genderwashing: Manipulasi Struktural dalam Kebijakan Reservasi.....	32
3.2 Prestige-Based Genderwashing: Legitimasi Internasional melalui Narasi Kesetaraan Gender.....	40
3.3 Performance-Based Genderwashing: Kampanye Simbolik untuk Legitimasi Elektoral	49
BAB IV PENUTUP	59
4.1 Kesimpulan	59
4.2 Rekomendasi.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>How Autocrats Weaponize Women's Rights</i> (Bjarnegård & Zetterberg, 2022).....	1
Tabel 2. Contoh Kerangka Normatif Nasional terkait Kesetaraan Gender di India	24
Tabel 3. Contoh Koordinasi Lintas-Lembaga dalam <i>Platform-Base Genderwashing</i> Pemerintah Modi	44

DAFTAR FIGUR

Figur 1. Narendra Modi.....	1
Figur 2. Vinayak Damodar Savarkar (Tokoh Ideologis Hindutva yang Menjadi Akar Politik BJP)	17
Figur 3. Amit Shah (Elite BJP)	27
Figur 4. Rahul Gandhi (Aktor Oposisi yang Disebut Dalam dinamika politik Parlemen)	28
Figur 5. Droupadi Murmu	30

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kebijakan politik perempuan di India pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi periode 2019-2024 dalam konteks kemunduran demokrasi. Meskipun pemerintah India secara aktif mempromosikan agenda kesetaraan gender dan peningkatan representasi politik perempuan, berbagai kebijakan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana komitmen tersebut bersifat substantif. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran *autocratic genderwashing* untuk menganalisis bagaimana isu hak dan representasi perempuan dimanfaatkan oleh rezim dengan kecenderungan otoriter sebagai instrumen legitimasi politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap dokumen kebijakan, laporan organisasi internasional, publikasi akademik, serta laporan organisasi masyarakat sipil. Argumen utama penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan politik perempuan di India lebih menekankan aspek simbolik dan prosedural dibandingkan dengan transformasi struktural yang nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan, termasuk melalui pengesahan *Women's Reservation Bill*, belum diikuti dengan pemberdayaan politik perempuan secara substantif. Kebijakan tersebut cenderung digunakan untuk membangun citra progresif pemerintah, baik di tingkat domestik maupun internasional, tanpa mengubah relasi kekuasaan patriarkal yang ada.

Kata-kata kunci: *Politik Perempuan, India, Autocratic Genderwashing, Reservasi Politik, Demokrasi.*

ABSTRACT

This study examines women's political policies in India during Prime Minister Narendra Modi's administration from 2019 to 2024 amid democratic backsliding. Although the Indian government actively promotes gender equality and women's political representation, these policies raise questions regarding their substantive commitment. This research employs the framework of autocratic genderwashing to analyze how women's rights and representation are instrumentalized by regimes with authoritarian tendencies as a means of political legitimation. The study adopts a qualitative method using a case study approach. Data are collected through a literature review of policy documents, reports from international organizations, academic publications, and civil society reports. The main argument of this research is that women's political policies in India emphasize symbolic and procedural measures rather than genuine structural transformation. The findings indicate that increases in women's political representation, including the passage of the Women's Reservation Bill, have not resulted in substantive political empowerment. Instead, these policies function largely as tools for domestic and international image-building, while patriarchal power relations and democratic erosion remain largely unaddressed.

Keywords: Women's Politics, India, Autocratic Genderwashing, Political Reservation, Democracy

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi dan representasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara. Meskipun perempuan mewakili sekitar separuh dari populasi dunia, keterwakilan mereka dalam lembaga pengambilan keputusan politik secara global masih jauh dari proporsional. Perdata tahun 2023, rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen nasional secara global hanya mencapai 26,5% (Inter-Parliamentary Union, 2023).

Kesenjangan representasi ini mencerminkan adanya hambatan struktural dan kultural yang menghalangi akses dan partisipasi perempuan dalam politik. India, sebagai demokrasi terbesar di dunia, memiliki pengalaman unik dalam menangani kesenjangan gender dalam politik melalui kebijakan reservasi atau kuota. Sejak kemerdekaan pada tahun 1947, India telah menempuh perjalanan panjang dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal. Konstitusi India mengakui kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, namun keterwakilan politik perempuan tetap rendah selama beberapa dekade. Pada awal 1990-an, keterwakilan perempuan di *Lok Sabha* (Dewan Rakyat) hanya sekitar 5% (Rai, 2002).

Titik balik signifikan terjadi pada tahun 1993 ketika Pemerintah India mengamandemen Konstitusi melalui Amandemen ke-73 dan ke-74 yang mengharuskan reservasi minimal sepertiga kursi untuk perempuan di Panchayat

(dewan desa) dan badan pemerintahan lokal perkotaan (Chattopadhyay & Duflo, 2004). Kebijakan ini menciptakan ruang politik bagi lebih dari satu juta perempuan yang terpilih dalam pemerintahan lokal di seluruh India (UN Women, 2018).

Inisiatif ini dipandang sebagai salah satu eksperimen terbesar dalam demokrasi partisipatif dan pemberdayaan perempuan dalam sejarah modern. Rasionalisasi kebijakan reservasi politik di India berakar pada pengakuan bahwa representasi deskriptif (kehadiran fisik) perempuan dalam lembaga politik merupakan prasyarat penting untuk mencapai representasi substantif (kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan yang responsif gender) (Pitkin, 1967) (Phillips, 1995). Sebagaimana pernah diargumentasikan, mencapai "massa kritis" perempuan dalam politik merupakan langkah penting menuju perubahan substantif dalam prioritas kebijakan dan budaya politik. Kebijakan reservasi di India dirancang tidak hanya untuk meningkatkan keterwakilan numerik perempuan, tetapi juga untuk mentransformasi lanskap politik dengan memastikan inklusi suara dan perspektif perempuan dalam pengambilan keputusan publik (Dahlerup 2006).

Setelah lebih dari dua dekade implementasi, dampak kebijakan reservasi politik terhadap pemberdayaan dan representasi perempuan di India menunjukkan hasil yang beragam. Beberapa studi mengindikasikan bahwa kebijakan ini telah berkontribusi pada peningkatan signifikan dalam partisipasi politik perempuan di tingkat lokal. Penelitian pertama menemukan bahwa desa-desa dengan pemimpin perempuan cenderung memiliki infrastruktur yang lebih baik terkait dengan kebutuhan perempuan dan anak-anak (Beaman et al., 2012). Penelitian lainnya menunjukkan adanya efek jangka panjang dari kebijakan reservasi terhadap

elektabilitas perempuan bahkan setelah kursi reservasi tersebut dihapus (Bhavnani, 2009).

Namun, berbagai studi juga menyoroti tantangan yang dihadapi oleh perempuan yang terpilih melalui sistem reservasi. Banyak perempuan yang terpilih menghadapi marginalisasi dalam proses pengambilan keputusan, sering kali menjadi "proksi" bagi suami atau anggota keluarga laki-laki mereka yang disebut sebagai fenomena "*sarpanch pati*" (suami kepala desa) (Buch, 2009) (Jayal, 2005). Ada studi yang menunjukkan bahwa perempuan yang terpilih melalui kursi reservasi sering menghadapi resistensi dari elite laki-laki dalam struktur kekuasaan lokal (Ban & Rao, 2008).

Konteks sosio-ekonomi dan kultural di India menyebabkan kompleksitas tersendiri dalam implementasi kebijakan reservasi. Sistem kasta, kesenjangan pendidikan, dan norma patriarkal yang kuat menciptakan lapisan tambahan dalam hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik (Chaudhary, 2012). Di beberapa wilayah, khususnya di negara bagian utara seperti Rajasthan dan Bihar, norma sosial yang membatasi mobilitas perempuan dan partisipasi publik mereka menghambat efektivitas kebijakan reservasi (Pande & Ford, 2011). Sebaliknya, di negara bagian selatan seperti Kerala dan Tamil Nadu, dengan indikator pembangunan manusia yang lebih tinggi, perempuan terpilih cenderung memiliki otonomi dan efektivitas yang lebih besar dalam peran politik mereka (Savvasi & Varre, 2013).

Kebijakan reservasi di tingkat pemerintahan lokal belum sepenuhnya diterjemahkan ke tingkat nasional. Upaya untuk memberikan reservasi 33% di Lok

Sabha dan badan legislatif negara bagian melalui *Women's Reservation Bill (The Constitution 108th Amendment)* yang pertama kali diajukan pada tahun 1996 telah mengalami penundaan berkepanjangan. Meskipun disetujui oleh *Rajya Sabha* pada tahun 2010, rancangan undang-undang tersebut belum diloloskan di *Lok Sabha* karena resistensi politik (Rai & Spary, 2019). Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kemauan politik dan hambatan struktural yang membatasi perluasan kebijakan reservasi ke tingkat yang lebih tinggi.

Partisipasi dan representasi politik perempuan merupakan indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi dan tingkat kesetaraan gender dalam suatu negara. Meskipun perempuan mewakili sekitar separuh populasi dunia, keterwakilan mereka dalam lembaga pengambilan keputusan politik secara global masih jauh dari proporsional, dengan rata-rata keterwakilan perempuan di parlemen nasional hanya mencapai 26,5% pada tahun 2023 (Inter-Parliamentary Union, 2023). Di India, demokrasi terbesar di dunia, perjalanan peningkatan keterwakilan perempuan mengalami titik balik signifikan pada tahun 1993 ketika diberlakukan amandemen konstitusi yang mewajibkan reservasi minimal sepertiga kursi untuk perempuan di tingkat pemerintahan lokal melalui badan Panchayat. Kebijakan ini telah membuka ruang politik bagi lebih dari satu juta perempuan di seluruh India, dan menjadi salah satu eksperimen terbesar dalam pemberdayaan perempuan di tingkat lokal (Chattopadhyay & Duflo, 2004; UN Women, 2018). Namun, hambatan struktural dan budaya seperti dominasi patriarki, sistem kasta, dan norma sosial yang membatasi peran perempuan masih sangat kuat, sehingga partisipasi perempuan sering kali bersifat simbolis dan tidak diiringi oleh kekuasaan substantif dalam pengambilan keputusan (Buch, 2009; Ban & Rao, 2008; Chaudhary, 2012).

Pada masa pemerintahan Narendra Modi antara 2014 hingga 2019, kebijakan reservasi politik perempuan terus dilanjutkan, namun praktik *genderwashing* menjadi isu yang mencuat. Fenomena "*sarpanch pati*", di mana perempuan yang terpilih sebagai kepala desa hanya menjadi "proksi" bagi suami atau anggota keluarga laki-laki, menunjukkan bahwa peningkatan numerik perempuan dalam pemerintahan lokal belum disertai pemberdayaan nyata (Jayal, 2005). Selain itu, meskipun pemerintah sering mempromosikan pencapaian kuota perempuan sebagai bukti kemajuan kesetaraan gender, di tingkat nasional pengesahan *Women's Reservation Bill* yang mengatur 33% kuota di parlemen masih tertunda karena resistensi politik, sehingga pemberdayaan perempuan di tingkat legislatif nasional belum terealisasi secara signifikan (Rai & Spary, 2019). Kondisi ini diperparah oleh peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan yang mencerminkan tarikan kontradiktif antara kemajuan simbolis dan realitas sosial yang masih penuh tantangan (Deccan Herald, 2024; The Diplomat, 2024).

Pada masa pemerintahan Narendra Modi yang dimulai sejak 2014 juga, praktik *genderwashing* mulai mengambil dimensi yang secara kualitatif berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Jika era *Kongres* dan *Vajpayee* ditandai dengan pengabaian atau penundaan pasif terhadap agenda representasi perempuan, rezim Modi secara aktif dan sistematis mengeksploitasi narasi pemberdayaan perempuan sebagai alat legitimasi baik domestik maupun internasional sembari secara bersamaan mengkonsolidasikan kekuasaan otoriter dan mempersempit ruang sipil (Chatterji et al., 2019). Fenomena inilah yang membedakan konsep *autocratic genderwashing* dari sekadar inkonsistensi kebijakan biasa karena merupakan strategi yang disengaja, terkoordinasi, dan berlangsung dalam konteks kemunduran

demokrasi yang terukur (Bjarnégard & Zetterberg, 2022; V-Dem Institute, 2023).

Pemilihan periode 2019-2024 sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, periode ini menandai masa jabatan kedua Modi yang ditandai dengan konsolidasi kekuasaan yang lebih kuat. Kedua, pada periode ini disahkannya Undang-Undang Reservasi Perempuan (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) pada September 2023 sebuah undang-undang yang telah tertunda hampir tiga dekade yang menjadi contoh paling jelas dari praktik *genderwashing* prosedural. Ketiga, pada tahun 2023 juga terdapat perkembangan penting terkait praktik *otoritarianisme* yang berjalan beriringan dengan kebijakan representasi perempuan: India mengalami penurunan peringkat dalam *Global Gender Gap Index* dari posisi 108 pada 2018 menjadi 127 pada 2023), kendati pemerintah gencar mempromosikan agenda kesetaraan gender. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan representasi perempuan tidak serta-merta mengentaskan ketimpangan gender struktural, justru sebaliknya, berfungsi sebagai perisai dari kritik internasional atas kemunduran demokrasi.

Meskipun terdapat sejumlah capaian dalam hal keterwakilan perempuan secara numerik, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa partisipasi politik perempuan di India masih bersifat terbatas, simbolik, dan sering kali dikendalikan oleh kekuatan *patriarkal*. Banyak perempuan yang dipilih melalui sistem kuota tidak memiliki akses pada kekuasaan substantif, dan justru berperan sebagai perpanjangan tangan dari elite laki-laki di partai atau keluarga politik mereka. Fenomena ini mengaburkan makna pemberdayaan yang sejati dan mempertanyakan apakah kebijakan reservasi yang dijalankan benar-benar mendukung kesetaraan atau justru menjadi alat simbolik untuk kepentingan politik tertentu.

Adanya bukti tentang dampak transformatif dari kebijakan reservasi, kesenjangan dalam literatur tetap ada mengenai efektivitas jangka panjang kebijakan ini dalam menciptakan perubahan berkelanjutan dalam struktur kekuasaan gender. Studi-studi yang ada cenderung berfokus pada dampak jangka pendek saja pada representasi deskriptif, dengan perhatian yang lebih sedikit pada dampak jangka menengah dan panjang terhadap transformasi institusional dan norma sosial. Selain itu, analisis komparatif tentang variasi dalam implementasi dan dampak kebijakan reservasi di berbagai negara bagian India masih terbatas.

Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih dalam bagaimana kebijakan reservasi politik digunakan, dan sejauh mana representasi perempuan benar-benar berkontribusi pada transformasi politik yang berkeadilan gender. Penelitian ini memfokuskan diri pada persoalan *genderwashing* sebagai lensa untuk mengkritisi kebijakan yang tampak progresif namun berpotensi menutupi kegagalan struktural dalam menjamin partisipasi dan pemberdayaan perempuan secara substansial. Penelitian ini juga menjadi penting untuk dilakukan mengingat masih terbatasnya dampak jangka panjang yang secara khusus menganalisis apakah ada *genderwashing* dalam konteks kebijakan reservasi politik di India, terutama dalam periode yang mencakup transformasi politik signifikan di bawah kepemimpinan Narendra Modi. Dengan fokus pemahaman yang mendalam tentang bagaimana dampak *genderwashing* terhadap representasi dan pemberdayaan perempuan akan memberikan kontribusi penting bagi literature hubungan internasional, khususnya dalam bidang gender dan politik global, serta dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif di negara-negara berkembang lainnya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana praktik *genderwashing* tercermin dalam implementasi kebijakan reservasi politik perempuan di India pada periode pemerintahan Narendra Modi (2019-2024)?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi kebijakan reservasi kursi legislatif perempuan di India pada periode Narendra Modi (2019-2024).
2. Mengidentifikasi indikasi praktik *genderwashing* dalam penerapan kebijakan reservasi politik perempuan.
3. Menilai dampak praktik *genderwashing* terhadap kualitas representasi politik dan pemberdayaan perempuan di India.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini secara khusus akan membatasi cakupan analisis pada periode pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi tahun 2019-2024, dengan fokus utama pada bagaimana kebijakan tersebut di India dijalankan dan direpresentasikan selama masa tersebut. Pemilihan periode ini didasarkan pada meningkatnya penggunaan narasi pemberdayaan perempuan dalam berbagai kebijakan dan kampanye politik pemerintah, serta kemunculan program-program simbolik yang diduga kuat mengandung unsur *genderwashing*. Secara khusus, tahun 2023 menjadi titik kritis dalam cakupan penelitian ini. Pada tahun tersebut, pemerintah India mengesahkan Undang-Undang Reservasi Perempuan (*Nari Shakti Vandan Adhiniyam*) yang selama hampir tiga dekade tertunda. Namun, bersamaan dengan

itu, praktik *otoritarianisme* justru semakin menguat India mengalami penurunan signifikan dalam berbagai indeks demokrasi dan kebebasan sipil. Paradoks ini antara kemajuan formal dalam representasi perempuan di satu sisi dan penguatan *otoritarianisme* di sisi lain menjadi inti analisis penelitian dalam melihat apakah terdapat peningkatan penggunaan isu representasi perempuan sebagai perisai legitimasi rezim di tahun 2023. Analisis ini penting untuk memverifikasi apakah pengesahan undang-undang tersebut merupakan komitmen substantif atau sekadar strategi *genderwashing* yang timed secara politik.

1.5 Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini bertujuan membantu penulis untuk mengulas berbagai studi yang mendukung efektivitas kebijakan tersebut maupun yang mengkritisnya sebagai bentuk *genderwashing*. Tinjauan pustaka pertama dari artikel “*Gender and Caste in Indian Political Reservations*” tahun 2024 yang ditulis oleh Kavita Dehalwar dan Shashikant Nishant Sharma (Delhawar & Sharma, 2024). Artikel ini menyajikan pendekatan interseksional, membahas bahwa perempuan dari kasta bawah menghadapi hambatan ganda dalam mengakses politik karena gender dan kasta. Ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan reservasi secara menyeluruh. Artikel ini juga membantu menambahkan perspektif interseksionalitas dengan mengangkat tantangan ganda yang dihadapi perempuan dari kasta bawah. Hal ini memperluas spektrum *genderwashing*, karena keterwakilan perempuan yang berhasil masuk ke lembaga legislatif sering kali tidak merepresentasikan kelompok marginal secara luas.

Tinjauan pustaka kedua dari buku “*Policies and Politics of Reservation in Context to Women in India*” tahun 2023 yang ditulis oleh Karandeep Singh dan

Pratibha Verma (Singh & Verma, 2023). Buku ini menyoroti hubungan antara kebijakan kuota perempuan dan proses politik yang dipolitisasi di India. Penulis menyebutkan adanya kecenderungan *tokenisme* dan manipulasi elit, di mana perempuan ditempatkan untuk kepentingan simbolik tanpa kekuasaan nyata. Buku ini juga menyoroti dilema antara representasi deskriptif dan substantif. Mereka menunjukkan bahwa seringkali perempuan dijadikan alat politik oleh elit partai melalui penempatan kandidat perempuan yang lemah atau dikendalikan oleh anggota keluarga laki-laki. Fenomena ini memperkuat indikasi bahwa *genderwashing* menjadi praktik yang nyata dalam sistem reservasi politik India.

Tinjauan pustaka ketiga dari artikel "*Identities and public policies: Unintended effects of political reservations for women in India*" tahun 2018 yang ditulis oleh Guilhem Cassan dan Lore Vandewalle (Cassan & Vandewalle, 2017). Artikel ini menunjukkan bahwa kebijakan kuota belum berhasil mengubah struktur kekuasaan patriarki di India secara mendalam. Meskipun secara numerik jumlah perempuan meningkat di lembaga-lembaga lokal, mereka masih minim dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini mendukung dugaan bahwa *genderwashing* dapat terjadi ketika kebijakan kuota hanya digunakan sebagai simbol kepedulian tanpa perubahan institusional yang mendalam. Artikel ini juga menyoroti bahwa peningkatan jumlah perempuan dalam politik tidak selalu diikuti dengan kekuasaan yang nyata, yang dapat mengindikasikan praktik *genderwashing*.

Berdasarkan ketiga studi yang telah diulas, terlihat bahwa meskipun kebijakan reservasi politik bagi perempuan di India berhasil meningkatkan keterwakilan secara numerik, tantangan struktural seperti dominasi kasta, *tokenisme*, dan minimnya kekuasaan substantif masih menghambat pemberdayaan sejati. Ketiganya belum sepenuhnya mengkaji bagaimana kebijakan tersebut dapat

dimaknai sebagai *genderwashing* dalam konteks simbolisme tanpa transformasi institusional yang nyata. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menelaah kebijakan reservasi tidak hanya dari aspek kuantitatif atau representasi, tetapi juga melalui perspektif kritis terhadap praktik *genderwashing* yang mungkin tersembunyi di balik retorika kesetaraan.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan konsep “*Autocratic Genderwashing*”, yakni strategi di mana rezim otoriter menggunakan reformasi gender seperti peningkatan keterwakilan perempuan, undang-undang HAM gender, dan pemberdayaan perempuan sebagai alat legitimasi dan propaganda, bukan transformasi demokratis sejati. Berdasarkan artikel Bjarnegård dan Zetterberg tentang “*How Autocrats Weaponize Women's Rights*”, konsep *genderwashing* dalam konteks otokrasi didefinisikan sebagai strategi manipulatif yang dilakukan penguasa otoriter. *Autocratic genderwashing* terjadi ketika mengambil kredit atas kemajuan kesetaraan gender untuk mengalihkan perhatian dari praktik-praktik non-demokratis yang persisten, seperti pelanggaran integritas elektoral dan hak asasi manusia (Bjarnegård & Zetterberg, 2022). Tabel 1 di bawah ini merangkum tiga strategi legitimasi utama yang digunakan rezim otoriter dalam praktik *autocratic genderwashing* berdasarkan kerangka Bjarnégard dan Zetterberg (2022). Ketiga strategi ini *procedure-based*, *prestige-based*, dan *performance-based* masing-masing menargetkan audiens yang berbeda dan menggunakan instrumen kebijakan gender yang berbeda pula, sebagaimana dijelaskan dalam kolom-kolom tabel berikut.

Tabel 1 - Legitimacy Strategies and Targets of Autocratic

Genderwashing

<i>Legitimation Strategy</i>	<i>Target Audience</i>	<i>Example of Gender-Equality Reform</i>
<i>Procedure-Based</i>	<i>Political Opposition</i>	Banyak kandidat perempuan berasal dari keluarga politik, sehingga tetap dikendalikan <i>elite</i> laki-laki.
<i>Prestige-Based</i>	<i>International Community</i>	Pemerintah Modi memamerkan jumlah perempuan di <i>Panchayat</i> dan legislatif lokal sebagai simbol kemajuan.
<i>Performance-Based</i>	<i>Citizens</i>	Kampanye seperti <i>Beti Bachao Beti Padhao</i> lebih berfungsi sebagai citra daripada menciptakan dampak struktural

Source: Article Journal “How Autocrats Weaponize Women's Rights”

(Bjarnegård & Zetterberg, 2022)

Berdasarkan tabel diatas, *Procedure-Based* (Berbasis Prosedur) Strategi ini menasar oposisi politik domestik. Caranya adalah dengan memanipulasi mekanisme formal kebijakan gender, misalnya mengisi kursi reservasi perempuan dengan kandidat dari keluarga atau dinasti politik yang tetap bisa dikendalikan oleh elite laki-laki. Jadi secara prosedural kuota terpenuhi, tapi kekuasaan nyata tidak berpindah ke perempuan. *Prestige-Based* (Berbasis Prestise) Strategi ini menasar komunitas internasional. Pemerintah memamerkan angka-angka kuantitatif, seperti

jumlah perempuan terpilih di *Panchayat* atau legislatif lokal, di forum-forum global sebagai simbol kemajuan gender. Dalam kasus Modi, angka 1,4 juta perempuan terpilih di tingkat lokal sering dipresentasikan di PBB dan G20, tanpa menyebut bahwa banyak dari mereka tidak memiliki kekuasaan pengambilan keputusan yang nyata. *Performance-Based* (Berbasis Kinerja/Penampilan) Strategi ini menasar warga negara atau pemilih domestik. Pemerintah meluncurkan kampanye dan program yang sangat terlihat dan berskala besar, seperti *Beti Bachao Beti Padhao* (Selamatkan Anak Perempuan, Didik Anak Perempuan), namun lebih berfungsi sebagai pencitraan elektoral daripada menghasilkan perubahan struktural. Audit CAG bahkan menemukan bahwa 56% dana program tersebut habis untuk iklan dan publisitas, bukan untuk intervensi substantif.

Dalam artikelnya juga memperlihatkan tabel “*Legitimacy Strategies and Targets of Autocratic Genderwashing*” yang menjelaskan tiga strategi utama yang digunakan rezim otoriter untuk meningkatkan legitimasi melalui isu hak-hak perempuan (Bjarnegård & Zetterberg, 2022). Relevansi dengan penelitian penulis adalah dari Strategi *procedure-based* kuota kursi legislatif untuk perempuan sering kali diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu dominasi elit partai atau aktor patriarkal. Kolom pertama tabel menunjukkan tiga tipologi strategi legitimasi yang digunakan rezim otoriter. Strategi *procedure-based* menargetkan oposisi politik domestik dengan cara memanipulasi mekanisme formal kebijakan gender misalnya memastikan kandidat perempuan berasal dari keluarga elite yang mudah dikendalikan sehingga kursi reservasi diisi tanpa mengancam dominasi elite laki-laki. Strategi *prestige-based* ditujukan kepada komunitas internasional, di mana capaian kuantitatif representasi perempuan dipamerkan di forum global sebagai bukti kemajuan gender tanpa diimbangi perubahan substantif. Sedangkan strategi *performance-based*

menyasar warga negara (pemilih domestik) melalui program- program berkampanye tinggi seperti *Beti Bachao Beti Padhao* yang lebih berfungsi sebagai alat pencitraan elektoral daripada menghasilkan transformasi struktural. Kerangka tiga dimensi ini menjadi lensa analitik utama yang digunakan sepanjang penelitian. Pada konsep *Autocratic Genderwashing* dari Bjarnegård & Zetterberg (2022), yang menjelaskan bagaimana rezim atau pemerintah dapat memanfaatkan isu kesetaraan gender bukan sebagai komitmen substantif, melainkan sebagai strategi legitimasi politik. Terdapat tiga dimensi utama yang menjadi tolok ukur, yakni *procedure-based*, *prestige-based*, dan *performance-based*. Pada dimensi *procedure-based*, penelitian ini menyoroti bagaimana penempatan perempuan dalam kursi legislatif di India, khususnya pada era pemerintahan Narendra Modi

(2019-2024), sering kali hanya bersifat formalitas karena banyak kandidat berasal dari dinasti politik sehingga tetap dikendalikan oleh elite laki-laki. Selanjutnya, pada dimensi *prestige-based*, pemerintah India kerap menonjolkan angka representasi perempuan di tingkat *Panchayat* maupun legislatif lokal di forum internasional sebagai simbol kemajuan, meskipun kenyataannya tidak disertai dengan perubahan struktural yang berarti. Terakhir, pada dimensi *performance-based*, berbagai program seperti *Beti Bachao Beti Padhao* lebih difungsikan sebagai kampanye citra dan alat diplomasi ketimbang menghasilkan dampak substantif terhadap pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini membantu menganalisis kesenjangan antara retorika kesetaraan gender yang digaungkan oleh pemerintah Modi dengan realitas implementasi kebijakan, serta mengungkap indikasi praktik *genderwashing* dalam politik reservasi perempuan di India.

1.7 Argumen Sementara

Berdasarkan konsep *genderwashing* oleh Bjarnegård dan Zetterberg, kebijakan reservasi politik di India menunjukkan adanya praktik *genderwashing* di mana ditunjukkan peningkatan representasi deskriptif perempuan secara numerik, namun tidak disertai pemberdayaan substantif atau perubahan struktur patriarkal. Hal ini dibuktikan dari *Procedure-based genderwashing* tampak dari penempatan kandidat perempuan yang terafiliasi keluarga politik, sehingga tetap dikendalikan elit. *Prestige-based* muncul saat pemerintah memamerkan keterwakilan perempuan di forum internasional sebagai simbol kemajuan, tanpa bukti kekuasaan substantif. Sementara itu, *performance-based* terlihat dalam program pemberdayaan yang bersifat simbolik dan tidak berkelanjutan. Ketiganya menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih digunakan untuk legitimasi, baik secara domestik maupun global, daripada untuk transformasi sosial yang sejati.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis untuk menganalisis praktik *genderwashing* dalam kebijakan reservasi politik di India di bawah kepemimpinan Narendra Modi periode 2019-2024. Penelitian kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena kompleks yang melibatkan aspek politik, sosial, dan budaya (Flick, 2018). Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan reservasi politik serta mengidentifikasi indikasi *genderwashing* melalui kerangka konsep *autocratic genderwashing* dari (Bjarnegård & Zetterberg, 2022).

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah kebijakan reservasi politik untuk perempuan di India, khususnya dalam konteks Panchayati Raj (pemerintahan lokal) dan lembaga legislatif tingkat negara bagian periode 2019-2024. Objek penelitian meliputi praktik *genderwashing* yang tercermin dalam tiga dimensi yaitu, *procedure-based*, *prestige-based*, dan *performance-based genderwashing* (Bjarnegård & Zetterberg, 2022). Fokus geografis penelitian mencakup negara bagian dengan implementasi kebijakan reservasi yang signifikan seperti *Kerala*, *Tamil Nadu*, *West Bengal*, *Bihar*, dan *Rajasthan* yang memiliki variasi konteks sosio-ekonomi dan kultural berbeda.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder. Data sekunder yang diambil diperoleh secara tidak langsung atau melalui pihak lain atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan. Data-data yang diambil bersumber dari literatur buku, dokumen dari internet seperti jurnal, berita, dan sumber laporan lainnya. Data ini juga berupa dokumenter peristiwa terdahulu seperti sejarah dan informasi dokumentasi lainnya yang dapat diambil melalui internet (online).

1.8.4 Proses Penelitian

Proses penelitian dilakukan dalam empat tahap. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan literatur relevan dengan menggunakan *systematic literature review* untuk memastikan *comprehensiveness* data. Tahap kedua adalah *content analysis* terhadap dokumen kebijakan dan laporan implementasi untuk

mengidentifikasi gap antara retorika dan realitas. Tahap ketiga adalah analisis komparatif antar negara bagian untuk memahami variasi implementasi kebijakan. Tahap keempat adalah triangulasi data dari berbagai sumber untuk memvalidasi temuan dan meminimalkan bias penelitian. Seluruh proses penelitian menggunakan kerangka teoritis *autocratic genderwashing* sebagai lensa analisis utama.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam empat bab utama yang saling berkaitan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai praktik *genderwashing* dalam kebijakan reservasi politik di India.

Bab 1 menyajikan latar belakang masalah representasi politik perempuan di India, rumusan masalah tentang praktik *genderwashing*, tujuan penelitian, serta kerangka teoritis *autocratic genderwashing* dari Bjarnegård dan Zetterberg (Bjarnegård & Zetterberg, 2022).

Bab 2 mengeksplorasi konsep *genderwashing*, teori representasi politik, dan konteks historis kebijakan reservasi politik di India.

Bab 3 menganalisis implementasi kebijakan reservasi politik di bawah kepemimpinan Narendra Modi periode 2019-2024 melalui tiga dimensi yaitu, *procedure-based*, *prestige-based*, dan *performance-based genderwashing*, serta dampaknya terhadap representasi dan pemberdayaan perempuan.

Bab 4 menyimpulkan temuan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk mencapai kesetaraan gender yang substantif dalam politik India.

BAB II

KONTEKS POLITIK DAN KEBIJAKAN GENDER

DI INDIA ERA NARENDRA MODI

2.1 Praktik Politik Otoriter Modi

Narendra Modi pertama kali menjabat sebagai Perdana Menteri India pada tahun 2014 dan terpilih kembali pada tahun 2019, menandai era baru dalam politik India. Kepemimpinan Modi di bawah partai *Bharatiya Janata Party* (BJP) telah menimbulkan perdebatan intensif mengenai karakter demokrasi India, dengan banyak pengamat internasional dan domestik yang mengidentifikasi kecenderungan otoritarian dalam praktik pemerintahannya. Memahami konteks politik otoriter ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana kebijakan gender, termasuk reservasi politik perempuan, diimplementasikan dan dipolitisasi selama periode 2019-2024.

2.1.1 Konsolidasi Kekuasaan dan Pelemahan Institusi Demokratis

Sejak kembali berkuasa pada 2019, pemerintahan Modi menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang sistematis melalui berbagai mekanisme. Salah satu karakteristik utama adalah pelemahan *checks and balances* dalam sistem demokrasi India. Penelitian dari berbagai lembaga independen menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam kualitas demokrasi India selama periode ini. *V-Dem Institute* dalam laporannya mengklasifikasikan India sebagai "*electoral autocracy*" sejak tahun 2019, menandai kemunduran dari status demokrasi elektoral yang sebelumnya dimiliki (Varieties of Democracy Institute, 2021). Konsolidasi

kekuasaan Modi terlihat jelas dalam dominasi BJP di berbagai tingkat pemerintahan. Dengan mayoritas yang kuat di *Lok Sabha* setelah pemilu 2019, pemerintah Narendra Modi memiliki kemampuan untuk meloloskan undang-undang dengan minim oposisi. Fenomena ini menciptakan situasi di mana mekanisme pengawasan parlementer menjadi lemah, dan ruang untuk diskusi demokratis yang substantif menyempit. Lebih lanjut, penggunaan instrumen konstitusional seperti *Ordinances* (dekrit) untuk mengesahkan kebijakan tanpa melalui debat parlemen yang memadai menunjukkan pola pemerintahan yang cenderung eksekutif-sentris dan mengurangi peran deliberatif legislatif (Jaffrelot, 2021).

Pelemahan institusi demokratis juga tampak dalam pembatasan ruang sipil dan kebebasan pers. *Freedom House* dalam laporan tahunannya menurunkan status kebebasan India dari "*free*" menjadi "*partly free*" pada tahun 2021, mencatat adanya peningkatan represi terhadap kritik pemerintah, pembungkaman media independen, dan penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membungkam aktivis dan jurnalis (Freedom House, 2021). *Reporter Without Borders* menempatkan India pada peringkat 150 dari 180 negara dalam *World Press Freedom Index 2023*, menunjukkan kondisi yang memburuk bagi kebebasan media (Reporters Without Borders, 2023).

2.1.2 Nasionalisme Hindu dan Politik Identitas

Dimensi penting lain dari politik Modi adalah promosi nasionalisme Hindu atau Hindutva sebagai ideologi politik dominan. *Hindutva* secara harfiah berarti "kehindu-an" (*Hindu-ness*) dan merupakan ideologi nasionalisme agama-kultural yang dikembangkan oleh V.D. Savarkar pada 1923. Dalam kerangka ini, *Hindutva*

mendefinisikan identitas nasional India berdasarkan warisan budaya Hindu, dan memandang India sebagai tanah air (*pitribhumi*) sekaligus tanah suci (*punyabhumi*) bagi umat Hindu. Berbeda dari Hinduisme sebagai agama, nasionalisme Hindu adalah proyek politik yang berupaya menjadikan nilai-nilai Hindu sebagai fondasi negara (Jaffrelot, 2021). Narendra Modi dan BJP secara historis berakar dalam gerakan *Rashtriya Swayamsevak Sangh* (RSS), sebuah organisasi nasionalis Hindu yang mempromosikan visi India sebagai negara Hindu. Sejak 2019, narasi *Hindutva* semakin menguat dalam wacana publik dan kebijakan pemerintah, menciptakan dinamika politik yang memarjinalkan minoritas agama, khususnya Muslim (Chatterji et al., 2019).

Politik identitas berbasis agama ini memiliki implikasi langsung terhadap isu gender dan hak perempuan. Dalam kerangka *Hindutva*, perempuan sering kali dikonstruksikan sebagai simbol kehormatan dan identitas nasional Hindu, namun sekaligus diposisikan dalam peran tradisional yang membatasi agensi mereka. Narasi tentang pemberdayaan perempuan dalam konteks ini sering kali digunakan untuk legitimasi politik tanpa mengubah struktur *patriarkal* yang mendasar. Sebagai contoh, kriminalisasi *Triple Talaq* pada tahun 2019 menunjukkan bagaimana pemerintah Modi menggunakan isu hak perempuan untuk kepentingan politik identitas diklaim melindungi perempuan Muslim, namun dikritik sebagai instrumen untuk mengintervensi urusan komunitas Muslim (Agnes, 2019). Contoh lainnya, retorika tentang perlindungan perempuan Hindu dari ancaman eksternal digunakan untuk memperkuat sentimen anti-Muslim, sementara kekerasan terhadap perempuan di dalam komunitas Hindu sendiri tidak mendapat perhatian yang memadai (Sarkar, 2018).

Lebih lanjut, kebijakan seperti kriminalisasi *Triple Talaq* (perceraian instan

dalam hukum Islam) pada tahun 2019 menunjukkan bagaimana pemerintah Modi menggunakan isu hak perempuan untuk kepentingan politik identitas. Meskipun diklaim sebagai langkah untuk melindungi perempuan Muslim, kritikus berpendapat bahwa kebijakan ini lebih merupakan instrumen untuk mengintervensi urusan internal komunitas Muslim dan memperkuat narasi bahwa Islam adalah ancaman bagi perempuan, tanpa mengatasi masalah kekerasan domestik yang sistemik di semua komunitas agama (Agnes, 2019).

2.1.3 Pembatasan Ruang Sipil dan Kebebasan Pers

Pemerintahan Modi juga ditandai dengan pembatasan sistematis terhadap ruang sipil (*civic space*) dan kebebasan pers yang semakin menyempit. Ruang sipil merujuk pada lingkungan yang memungkinkan masyarakat sipil, organisasi non-pemerintah, aktivis, jurnalis, dan warga negara biasa untuk berkumpul, berorganisasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik tanpa hambatan yang tidak semestinya. Selama periode 2019-2024, ruang ini mengalami penyempitan signifikan melalui berbagai mekanisme legal dan ekstra-legal.

Pembatasan terhadap kebebasan pers menjadi salah satu indikator paling jelas dari penyempitan ruang sipil. *Freedom House* dalam laporan tahunannya menurunkan status kebebasan India dari "*free*" menjadi "*partly free*" pada tahun 2021, mencatat adanya peningkatan represi terhadap kritik pemerintah, pembungkaman media independen, dan penggunaan undang-undang anti-terorisme untuk membungkam aktivis dan jurnalis (Freedom House, 2021). *Reporter Without Borders* menempatkan India pada peringkat 150 dari 180 negara dalam *World Press Freedom Index 2023*, menunjukkan kondisi yang memburuk bagi kebebasan media (Reporters Without Borders, 2023). Jurnalis yang melaporkan isu-isu sensitif seperti

kekerasan komunal, korupsi, atau pelanggaran hak asasi manusia menghadapi intimidasi, serangan siber, tuntutan hukum strategis untuk membungkam (SLAPP - *Strategic Lawsuits Against Public Participation*), dan bahkan kekerasan fisik.

Organisasi masyarakat sipil juga menghadapi pembatasan yang semakin ketat melalui regulasi *Foreign Contribution Regulation Act* (FCRA). Pemerintah Modi menggunakan FCRA untuk membekukan lisensi ratusan organisasi non-pemerintah yang menerima dana asing, termasuk organisasi-organisasi yang bekerja pada isu hak asasi manusia, lingkungan, dan kesetaraan gender (Amnesty International, 2020). Pembatasan ini secara efektif melumpuhkan kemampuan organisasi-organisasi tersebut untuk beroperasi dan memberikan layanan kepada komunitas yang mereka dampingi. Aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan tokoh masyarakat sipil yang vokal dalam mengkritik kebijakan pemerintah menghadapi risiko penangkapan di bawah undang-undang seperti *Unlawful Activities Prevention Act* (UAPA), yang memiliki definisi "aktivitas melawan hukum" yang sangat luas dan sering disalahgunakan untuk membungkam dissent (Human Rights Watch, 2021).

Dalam konteks kebijakan gender, pembatasan ruang sipil memiliki implikasi langsung terhadap kemampuan aktivis perempuan dan organisasi hak perempuan untuk mengadvokasi perubahan kebijakan, mengorganisir gerakan sosial, dan mempertanyakan kebijakan pemerintah yang tidak responsif gender.

Organisasi-organisasi perempuan yang bekerja pada isu-isu kontroversial seperti kekerasan berbasis gender, hak reproduksi, atau diskriminasi berdasarkan kasta dan agama menghadapi tekanan yang meningkat. Penyempitan ruang sipil menciptakan lingkungan di mana kritik terhadap kebijakan gender pemerintah menjadi sulit disuarakan, dan narasi resmi tentang "pemberdayaan perempuan" menjadi dominan

tanpa *counter narrative* yang efektif. Hal ini memfasilitasi praktik *genderwashing* karena mengurangi *accountability* dan transparansi dalam implementasi kebijakan gender.

2.2. Pemenuhan Status Hak Perempuan di India

2.2.1 Kerangka Normatif Hak Perempuan: Perspektif Internasional dan Nasional

Pemenuhan hak perempuan di India harus dipahami dalam kerangka normatif yang mencakup instrumen hukum internasional dan nasional. Pada tingkat internasional, India merupakan negara pihak pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi pada tahun 1993. CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, termasuk dalam kehidupan politik dan publik (United Nations, 1979).

Pada tingkat nasional, kerangka normatif mengenai kesetaraan gender di India berlandaskan pada Konstitusi India yang menjamin prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara. Pasal 14 Konstitusi India menegaskan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, sementara Pasal 15 melarang diskriminasi berdasarkan agama, ras, kasta, jenis kelamin, atau tempat lahir. Selain itu, Pasal 15(3) memberikan dasar hukum bagi negara untuk mengambil tindakan afirmatif guna meningkatkan posisi perempuan dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam konteks representasi politik upaya afirmatif tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan, termasuk amandemen konstitusi yang memberikan kuota perempuan di tingkat pemerintahan tahun 2023 (Inter-Parliamentary Union, 2023).. Meskipun demikian, representasi perempuan di tingkat legislatif nasional masih relatif rendah, yakni sekitar 26,5%

secara global pada tingkat lokal sejak tahun 1993.

Tabel 2 - Kerangka Normatif Nasional terkait Kesetaraan Gender di India

Kerangka Normatif Nasional	Substansi Utama
Konstitusi India Pasal 14 dan 15 (<i>Constitution of India</i>)	Menjamin kesetaraan dihadapan hukum dan melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.
Pasal 15(3) Konstitusi India (<i>Constitution of India</i>)	Memberikan dasar hukum bagi kebijakan afirmatif untuk meningkatkan posisi perempuan.
Amendemen Konstitusi ke-73 dan ke-74 (1993)	Memberikan kuota perempuan di pemerintahan local (<i>panchayat</i> dan <i>municipal</i>).
<i>Nari Shakti Vandan Adhiniyam</i> atau <i>Women's Reservation Act (2023)</i>	Mengalokasikan 33% kursi perempuan di <i>Lok Sabha</i> dan legislative negara bagian.
Data perempuan representasi global (<i>Inter-Parliamentary Union 2023</i>)	Representasi perempuan di parlemen nasional global sekitar 26,5%.

Source: *Constitution of India; Inter-Parliamentary Union (2023); Shirin M. Rai & Carole Spary (2019).*

Perkembangan terbaru dalam kerangka normatif nasional adalah pengesahan Undang-Undang Reservasi Perempuan (*Nari Shakti Vandan Adhiniyam*) pada tahun 2023, yang mengalokasikan 33% kursi bagi perempuan di *Lok Sabha* dan Majelis Legislatif Negara Bagian. Kebijakan ini dipromosikan oleh pemerintah sebagai langkah besar menuju kesetaraan gender dalam politik. Namun, implementasinya masih bergantung pada proses delimitasi daerah pemilihan setelah sensus nasional, sehingga penerapannya belum dapat direalisasikan secara langsung. Situasi ini memunculkan kritik bahwa kebijakan tersebut lebih berfungsi

sebagai simbol komitmen terhadap kesetaraan gender daripada perubahan struktural yang segera meningkatkan representasi perempuan dalam politik (Rai & Spary, 2019).

Pada tingkat nasional, Konstitusi India memberikan jaminan kesetaraan gender melalui berbagai pasal. Pasal 14 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 15 melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dan Pasal 16 menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan publik. Lebih lanjut, Pasal 39(a) menyatakan bahwa negara harus mengarahkan kebijakannya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas mata pencaharian yang memadai. Konstitusi juga memberikan kewenangan khusus kepada negara untuk membuat ketentuan khusus bagi perempuan dan anak-anak (Pasal 15(3)), yang menjadi dasar hukum untuk kebijakan afirmatif seperti reservasi politik (Constitution of India, 1950). Namun, meskipun kerangka normatif yang komprehensif ini ada, implementasi dan pemenuhan hak perempuan dalam praktik masih jauh dari ideal. Gap antara *de jure* (hukum di atas kertas) dan *de facto* (realitas di lapangan) tetap signifikan, mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang dalam.

2.2.2 Pemenuhan Hak Perempuan Periode 2019-2024

Pemenuhan hak perempuan di India harus dipahami dalam kerangka normatif yang mencakup instrumen hukum internasional dan nasional. Pada tingkat internasional, India merupakan negara pihak pada *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang diratifikasi pada tahun 1993. CEDAW mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil langkah-langkah konkret guna menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam

segala bentuknya, termasuk dalam kehidupan politik dan publik (United Nations, 1979).

Pada tingkat nasional, Konstitusi India memberikan jaminan kesetaraan gender melalui berbagai pasal. Pasal 14 menjamin kesetaraan di hadapan hukum, Pasal 15 melarang diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dan Pasal 16 menjamin kesetaraan kesempatan dalam pekerjaan publik. Lebih lanjut, Pasal 39(a) menyatakan bahwa negara harus mengarahkan kebijakannya untuk memastikan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama atas mata pencaharian yang memadai. Konstitusi juga memberikan kewenangan khusus kepada negara untuk membuat ketentuan khusus bagi perempuan dan anak-anak (Pasal 15(3)), yang menjadi dasar hukum untuk kebijakan afirmatif seperti reservasi politik (Constitution of India, 1950). Namun, meskipun kerangka normatif yang komprehensif ini ada, implementasi dan pemenuhan hak perempuan dalam praktik masih jauh dari ideal. *Gap de jure* (hukum di atas kertas) dan *de facto* (realitas di lapangan) tetap signifikan, mencerminkan tantangan struktural dan kultural yang dalam.

Untuk mengevaluasi pemenuhan hak perempuan selama periode pemerintahan Modi 2019-2024, penting untuk melihat berbagai indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencakup dimensi ekonomi, politik, sosial, dan keamanan. Dalam dimensi partisipasi ekonomi dan ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan *Female Labour Force Participation Rate* atau (FLFPR) menjadi indikator kunci. Data dari *Periodic Labour Force Survey* (PLFS) menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan marginal dalam FLFPR dari 23,3% pada 2017-18 menjadi sekitar 32,8% pada 2022-23, angka ini masih jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata global dan *regional* (National Statistical Office,

2023). Lebih mengkhawatirkan, sebagian besar peningkatan ini terjadi dalam sektor informal dan pekerjaan dengan upah rendah, bukan dalam pekerjaan berkualitas dengan perlindungan sosial yang memadai. Kesenjangan upah gender juga tetap persisten, dengan perempuan di India rata-rata menerima upah 19% lebih rendah daripada laki-laki untuk pekerjaan yang sama menurut laporan *Monster Salary Index* (Monster India, 2022). Kesenjangan ini lebih besar di sektor informal dan di antara pekerja tidak terampil, yang merupakan mayoritas perempuan pekerja di India.

Sementara itu, dalam dimensi representasi politik, meskipun ada kebijakan reservasi 33% untuk perempuan di tingkat *Panchayat* (pemerintahan desa) yang telah berjalan sejak 1993, representasi perempuan di tingkat legislatif nasional tetap rendah. Pada pemilu *Lok Sabha* 2019, hanya 78 dari 543 anggota parlemen adalah perempuan, atau sekitar 14,4% (Election Commission of India, 2019). Angka ini menunjukkan peningkatan dari pemilu-pemilu sebelumnya, namun masih jauh di bawah target 33% yang telah lama diperjuangkan melalui *Women's Reservation Bill*. *Women's Reservation Bill (Nari Shakti Vandan Adhiniyam)*, yang mengalokasikan 33% kursi di *Lok Sabha* dan legislatif negara bagian untuk perempuan, akhirnya disahkan pada September 2023 setelah tertunda selama hampir dua dekade (Parliament of India, 2023). Namun, implementasinya ditangguhkan hingga selesainya proses delimitasi (pembatasan ulang) konstituensi pemilihan, yang diperkirakan baru akan terjadi setelah sensus berikutnya. Penundaan ini menimbulkan skeptisisme tentang komitmen sebenarnya pemerintah terhadap representasi politik perempuan yang substantif.

Indikator keamanan dan kekerasan terhadap perempuan menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan selama periode ini. Data dari *National Crime*

Records Bureau (NCRB) mengungkapkan peningkatan konsisten dalam kejahatan terhadap perempuan, dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 405.861 pada tahun 2020 menjadi 428.278 pada tahun 2021 (National Crime Records Bureau, 2022). Namun, angka ini hanya mencerminkan kasus yang dilaporkan, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan berbasis gender tidak dilaporkan karena stigma sosial, ketakutan akan pembalasan, dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Kasus-kasus kekerasan seksual yang mendapat perhatian publik, seperti kasus pemerkosaan kelompok di *Hathras (Uttar Pradesh)* pada 2020 dan berbagai kasus serupa lainnya, mengungkapkan tidak hanya prevalensi kekerasan tetapi juga respons negara yang seringkali tidak memadai. Dalam beberapa kasus, terdapat indikasi bahwa otoritas lokal berusaha menekan kasus atau melindungi pelaku, terutama ketika pelaku memiliki afiliasi politik dengan partai yang berkuasa (Human Rights Watch, 2020).

Analisis terhadap indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum dan kebijakan yang progresif, pemenuhan hak perempuan di India menghadapi tantangan implementasi yang serius. Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural. Pertama, norma patriarkal yang tertanam dalam struktur sosial India terus menghambat kemajuan. Sistem kasta dan hirarki gender yang saling bersinggungan menciptakan bentuk diskriminasi berlapis yang sulit diatasi hanya melalui intervensi kebijakan (Deshpande & Weisskopf, 2014). Perempuan dari kasta rendah dan minoritas agama menghadapi diskriminasi ganda atau bahkan *triple*, yang membuat akses mereka terhadap hak dan peluang jauh lebih terbatas.

Kedua, lemahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan menciptakan gap antara kebijakan dan praktik. Korupsi,

inefisiensi birokrasi, dan kurangnya sumber daya dalam sistem peradilan membuat banyak undang-undang perlindungan perempuan tidak efektif di lapangan (Mander, 2018). Ketiga, kurangnya *political will* yang konsisten untuk transformasi gender sejati menjadi hambatan utama. Meskipun retorika pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam wacana politik, prioritas kebijakan dan alokasi anggaran tidak selalu mencerminkan komitmen ini. Analisis anggaran gender menunjukkan bahwa alokasi untuk program-program spesifik perempuan tetap sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan (Centre for Budget and Governance Accountability, 2022).

2.2.3 Kesenjangan Implementasi dan Tantangan Struktural

Analisis terhadap indikator-indikator di atas menunjukkan bahwa meskipun ada kerangka hukum dan kebijakan yang progresif, pemenuhan hak perempuan di India menghadapi tantangan implementasi yang serius. Kesenjangan ini dapat dijelaskan melalui beberapa faktor struktural.

Pertama, norma patriarkal yang tertanam dalam struktur sosial India terus menghambat kemajuan. Sistem kasta dan hirarki gender yang saling bersinggungan menciptakan bentuk diskriminasi berlapis yang sulit diatasi hanya melalui intervensi kebijakan (Deshpande & Weisskopf, 2014). Perempuan dari kasta rendah dan minoritas agama menghadapi diskriminasi ganda atau bahkan triple, yang membuat akses mereka terhadap hak dan peluang jauh lebih terbatas.

Kedua, lemahnya kapasitas negara dalam penegakan hukum dan implementasi kebijakan menciptakan gap antara kebijakan dan praktik. Korupsi, ineffisiensi birokrasi, dan kurangnya sumber daya dalam sistem peradilan membuat banyak undang-undang perlindungan perempuan tidak efektif di lapangan (Mander,

2018).

Ketiga, kurangnya political will yang konsisten untuk transformasi gender sejati menjadi hambatan utama. Meskipun retorika pemberdayaan perempuan sering digunakan dalam wacana politik, prioritas kebijakan dan alokasi anggaran tidak selalu mencerminkan komitmen ini. Analisis anggaran gender menunjukkan bahwa alokasi untuk program-program spesifik perempuan tetap sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan (Centre for Budget and Governance Accountability, 2022).

BAB III

PRAKTIK AUTOCRATIC GENDERWASHING DALAM KEBIJAKAN POLITIK PEREMPUAN INDIA ERA NARENDRA MODI (2019-2024)

3.1 *Procedure-Based Genderwashing: Manipulasi Struktural* dalam Kebijakan Reservasi

Procedure-based genderwashing merujuk pada strategi di mana rezim otoriter memanipulasi prosedur dan mekanisme formal kebijakan gender untuk menciptakan ilusi kemajuan tanpa mengubah struktur kekuasaan yang mendasar. Dalam konteks kebijakan reservasi politik perempuan di India, praktik ini termanifestasi dalam beberapa bentuk yang saling terkait.

Momen paling signifikan dalam periode Modi adalah pengesahan *Women's Reservation Bill (The Constitution 128th Amendment Act)* atau *Nari Shakti Vandan Adhiniyam* pada September 2023. UU ini mengalokasikan 33% kursi di *Lok Sabha* dan legislatif negara bagian untuk perempuan, sebuah proposal yang telah tertunda sejak 1996 (Parliament of India, 2023). Secara spesifik, undang-undang ini mengamandemen Konstitusi India dengan menambahkan Pasal 239AA dan Pasal 334 yang menyatakan bahwa "tidak kurang dari sepertiga dari total jumlah kursi yang dicadangkan untuk dijabat oleh perempuan, termasuk jumlah kursi yang dicadangkan untuk perempuan yang termasuk dalam *Scheduled Castes* dan *Scheduled Tribes*" (The Constitution 128th Amendment Act, 2023). Bunyi undang-undang tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa reservasi ini akan berlaku untuk *Lok Sabha*, *Legislative Assemblies* negara bagian, dan *Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi*. Namun, aspek krusial dari UU ini yang mengungkap praktik *genderwashing*

adalah klausul implementasi yang tercantum dalam Pasal 4 yang menyatakan bahwa "ketentuan-ketentuan dari undang-undang ini akan berlaku setelah pelaksanaan kegiatan delimitasi yang dilakukan setelah Sensus pertama yang dilakukan setelah dimulainya undang-undang ini" (The Constitution 128th Amendment Act, 2023). Klausul ini secara efektif menunda implementasi hingga selesainya proses delimitasi (redistribusi) konstituensi pemilihan yang hanya akan dilakukan setelah sensus nasional. Proses sensus yang seharusnya dilakukan pada 2021 tertunda dan hingga akhir 2024 belum dilaksanakan karena berbagai alasan teknis dan politik. Berdasarkan pengalaman historis, proses delimitasi di India memakan waktu 3-5 tahun setelah sensus selesai, yang berarti implementasi aktual reservasi 33% kemungkinan baru akan terjadi setelah 2030, atau lebih dari tiga siklus pemilu dari waktu pengesahan (Palshikar, 2023).

Penundaan implementasi ini menciptakan situasi paradoks di mana pemerintah Modi mendapatkan kredit politik penuh dari pengesahan UU historis tanpa harus menghadapi konsekuensi politik aktual dari peningkatan representasi perempuan dalam waktu dekat. Struktur kekuasaan politik yang didominasi laki-laki tetap tidak terganggu, sementara narasi pemberdayaan perempuan dapat terus dipromosikan untuk kepentingan legitimasi domestik dan internasional. Analisis dari *Constitutional Conduct Group* menunjukkan bahwa penundaan ini bukan sekadar masalah teknis administratif, tetapi merupakan strategi politik yang disengaja untuk menghindari gangguan terhadap dominasi elit laki-laki dalam partai-partai politik, termasuk BJP (Constitutional Conduct Group, 2023).

Lebih lanjut, mekanisme rotasi kursi yang diatur dalam undang-undang juga

mengandung potensi manipulasi prosedural. Pasal 3 menyebutkan bahwa "kursi yang dicadangkan untuk perempuan akan dialokasikan dengan rotasi ke konstituensi berbeda di setiap delimitasi berikutnya" (The Constitution 128th Amendment Act, 2023). Meskipun rotasi dimaksudkan untuk memastikan distribusi yang adil, dalam praktiknya sistem ini dapat digunakan oleh partai politik untuk menghindari memberikan basis kekuasaan yang stabil bagi perempuan politisi. Penelitian tentang sistem rotasi dalam reservasi Panchayat menunjukkan bahwa rotasi kursi sering menghalangi perempuan untuk membangun basis dukungan politik yang kuat dan berkelanjutan, karena mereka harus terus berpindah konstituensi dan tidak dapat mengembangkan hubungan jangka panjang dengan pemilih (Bhavnani, 2009). Sistem rotasi juga membuka peluang bagi partai untuk secara strategis menempatkan kandidat perempuan yang lemah atau yang dapat dikendalikan di kursi-kursi tertentu, sambil mempertahankan kandidat laki-laki yang kuat di kursi *non-reserve*.

Meskipun kebijakan reservasi 33% di *Panchayat Raj Institutions* telah menghasilkan lebih dari 1,4 juta perempuan terpilih di tingkat lokal (Ministry of Panchayati Raj, 2023), realitas di lapangan menunjukkan fenomena "*proxy leadership*" yang persisten. Fenomena "*sarpanch pati*" (suami kepala desa) tetap lazim, di mana suami atau anggota keluarga laki-laki lain yang sebenarnya menjalankan kekuasaan dan membuat keputusan. *The Panchayats (Extension to Scheduled Areas) Act 1996* atau PESA Act yang memberikan kewenangan khusus kepada Gram Sabha (pertemuan desa) di daerah tribal seharusnya memberdayakan perempuan dalam pengambilan keputusan lokal. Pasal 4(d) PESA secara eksplisit menyatakan bahwa "setiap Gram Sabha akan kompeten untuk melindungi dan

melestarikan tradisi dan kebiasaan masyarakat, identitas budaya, sumber daya komunitas dan cara penyelesaian sengketa secara adat" (The Panchayats Extension to Scheduled Areas Act, 1996). Namun, dalam implementasinya, perempuan terpilih sering dikecualikan dari forum pengambilan keputusan ini atau kehadiran mereka bersifat pasif dan simbolik.

Penelitian etnografis yang dilakukan oleh Buch (2009) di *Madhya Pradesh* dan *Rajasthan* menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, perempuan terpilih tidak menghadiri pertemuan pemerintahan lokal secara teratur karena hambatan mobilitas, norma *purdah* (pengasingan perempuan), dan kurangnya dukungan dari keluarga. Ketika hadir, mereka sering tidak berbicara atau berpartisipasi aktif dalam diskusi karena kurangnya kepercayaan diri, pendidikan formal yang terbatas, dan intimidasi dari elite laki-laki lokal (Buch, 2009). Studi komparatif oleh Ban dan Rao (2008) menemukan bahwa perempuan terpilih menghadapi resistensi sistematis dari struktur kekuasaan patriarkal yang sudah mapan, termasuk boikot pertemuan oleh anggota laki-laki, penolakan untuk berbagi informasi penting, dan marginalisasi dalam alokasi sumber daya pembangunan.

Struktur prosedural sistem reservasi memungkinkan praktik *proxy leadership* ini berlanjut karena tidak ada mekanisme efektif untuk memastikan bahwa perempuan terpilih memiliki otonomi dan kekuasaan substantif. *The Representation of the People Act 1951*, yang mengatur proses pemilihan, menetapkan kualifikasi formal untuk kandidat tetapi tidak mencakup ketentuan untuk memverifikasi bahwa perempuan terpilih benar-benar akan menjalankan fungsi mereka secara independen. Pasal 4 dan 5 undang-undang ini hanya mensyaratkan bahwa kandidat harus menjadi warga negara India, terdaftar sebagai

pemilih, dan tidak didiskualifikasi berdasarkan alasan tertentu seperti hukuman pidana atau korupsi (The Representation of the People Act, 1951). Tidak ada mekanisme untuk menilai kapasitas aktual, kesiapan, atau independensi kandidat perempuan.

Pelatihan dan dukungan untuk perempuan terpilih tetap minimal dan tidak sistematis. Meskipun *Ministry of Panchayati Raj* telah meluncurkan berbagai program pelatihan seperti *Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan* (RGSA), implementasi di lapangan sangat bervariasi antar negara bagian dan sering tidak menjangkau perempuan yang paling membutuhkan (Ministry of Panchayati Raj, 2022). Laporan evaluasi RGSA menunjukkan bahwa banyak sesi pelatihan bersifat formal dan tidak memberikan keterampilan praktis yang dibutuhkan perempuan untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif, seperti literasi keuangan, pemahaman tentang skema pemerintah, atau keterampilan negosiasi dan kepemimpinan (National Institute of Rural Development and Panchayati Raj, 2021). Lebih kritis, tidak ada sanksi atau konsekuensi hukum bagi keluarga atau partai politik yang menggunakan perempuan sebagai *proxy* atau yang menghalangi perempuan terpilih untuk menjalankan fungsi mereka secara independen.

Women's Reservation Bill 2023 juga tidak mencakup mekanisme untuk mengatur nominasi partai di luar kursi yang di-*reserve*. Partai-partai politik tidak diwajibkan untuk meningkatkan proporsi kandidat perempuan secara keseluruhan, hanya untuk memastikan bahwa kursi yang di-*reserve* diisi oleh perempuan. Analisis data pemilu menunjukkan bahwa partai-partai politik di India secara konsisten mencalonkan lebih sedikit perempuan daripada laki-laki. Dalam pemilu *Lok Sabha* 2019, hanya sekitar 9% dari total kandidat adalah perempuan, dengan

BJP mencalonkan 8% kandidat perempuan, *Congress* 12%, dan partai-partai regional bervariasi antara 5-15% (Election Commission of India, 2019). Pola ini menunjukkan bahwa tanpa perubahan dalam praktik nominasi partai, reservasi 33% mungkin menjadi batas maksimum daripada batas minimum untuk representasi perempuan. Partai-partai politik dapat memenuhi kuota dengan mencalonkan perempuan hanya di kursi yang di-*reserve*, sambil terus mendominasi nominasi untuk kursi non-*reserve* dengan kandidat laki-laki.

Lebih lanjut UU tidak mencakup ketentuan untuk sub-reservasi bagi perempuan dari kelompok marginal seperti OBC (*Other Backward Classes*), Muslim, atau *Scheduled Tribes*, menimbulkan risiko bahwa reservasi akan secara tidak proporsional menguntungkan perempuan dari kasta atas dan kelas menengah atas (Menon, 2023). Analisis sosiologis menunjukkan bahwa dalam sistem reservasi yang tidak mempertimbangkan interseksionalitas kasta, kelas, dan agama, perempuan yang memiliki akses terhadap pendidikan, jaringan politik, dan sumber daya ekonomi akan lebih mungkin untuk mencalonkan diri dan terpilih. Data dari sistem reservasi Panchayat menunjukkan bahwa perempuan dari *Scheduled Castes* dan *Scheduled Tribes* yang memiliki sub-reservasi khusus memiliki representasi yang lebih baik dibandingkan perempuan dari OBC dan minoritas agama yang tidak memiliki sub-reservasi (Deshpande & Ramachandran, 2019). Ketiadaan sub-reservasi dalam *Women's Reservation Bill* mengabaikan realitas diskriminasi berlapis yang dihadapi perempuan dari kelompok marginal dan dapat memperkuat ketimpangan yang sudah ada.

Implementasi kebijakan reservasi di tingkat Panchayat juga menghadapi tantangan *accountability* yang serius. Tidak ada mekanisme monitoring yang efektif

untuk memastikan bahwa perempuan terpilih benar-benar menjalankan fungsi mereka dan memiliki kekuasaan pengambilan keputusan. *The Panchayat Raj Acts* di berbagai negara bagian memberikan kewenangan kepada pemerintah negara bagian untuk mengawasi fungsi *Panchayat*, namun dalam praktiknya pengawasan ini minimal dan tidak fokus pada aspek gender. Laporan-laporan dari berbagai negara bagian menunjukkan bahwa perempuan terpilih sering menghadapi intimidasi, marginalisasi, dan bahkan kekerasan dari elite laki-laki lokal yang merasa terancam oleh kehadiran mereka (Jayal, 2005). Studi kasus di Haryana mendokumentasikan insiden di mana perempuan *sarpanch* dipaksa mundur, diserang secara fisik, atau rumah mereka dirusak ketika mereka mencoba menjalankan kewenangan mereka secara independen (Chowdhury, 2020).

Mekanisme untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus ini lemah, dan perempuan sering tidak memiliki sumber daya atau dukungan untuk mencari keadilan. *The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005* memberikan perlindungan hukum terhadap kekerasan domestik, tetapi tidak secara spesifik menangani kekerasan atau intimidasi yang dihadapi perempuan dalam peran politik mereka. Pasal 3 undang-undang ini mendefinisikan "*domestic violence*" sebagai "*any act, omission or commission or conduct of the respondent shall constitute domestic violence in case it harms or injures or endangers the health, safety, life, limb or well-being, whether mental or physical, of the aggrieved person*" (The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005). Meskipun definisi ini cukup luas, dalam praktiknya undang-undang ini jarang digunakan untuk melindungi perempuan politisi dari intimidasi dalam menjalankan fungsi publik mereka.

Kesenjangan prosedural lain terletak pada sistem pembiayaan kampanye dan dukungan partai. Perempuan kandidat umumnya memiliki akses yang lebih terbatas terhadap sumber daya finansial untuk kampanye dibandingkan kandidat laki-laki, dan partai politik sering memberikan dukungan yang tidak setara. Meskipun *The Representation of the People Act 1951* mengatur batas pengeluaran kampanye untuk kandidat *Lok Sabha* dan legislatif negara bagian, undang-undang ini tidak mencakup ketentuan untuk memastikan kesetaraan akses terhadap sumber daya kampanye (*The Representation of the People Act, 1951*). Penelitian oleh *Centre for Media Studies* menunjukkan bahwa kandidat perempuan rata-rata menghabiskan 30-40% lebih sedikit untuk kampanye dibandingkan kandidat laki-laki, bukan karena batas pengeluaran tetapi karena kurangnya akses terhadap donor dan jaringan pembiayaan (*Centre for Media Studies, 2019*). Ketimpangan finansial ini memberikan disadvantage sistematis bagi kandidat perempuan dalam kompetisi elektoral.

Praktik *procedure-based genderwashing* dalam sistem reservasi India juga tercermin dalam mekanisme enforcement yang lemah terhadap pelanggaran ketentuan reservasi. *Election Commission of India* memiliki kewenangan untuk mengawasi proses pemilihan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan reservasi, namun sanksi untuk pelanggaran relatif ringan dan jarang diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa kasus yang didokumentasikan, partai politik gagal mencalonkan jumlah perempuan yang memadai di kursi *reserve* atau melakukan manipulasi administratif untuk menghindari ketentuan reservasi, namun hanya menghadapi denda minimal atau teguran tanpa konsekuensi elektoral yang signifikan (*Jenselius, 2016*). Lemahnya *enforcement mechanism* ini mengirimkan

pesan bahwa kepatuhan terhadap kebijakan reservasi bersifat opsional dan dapat dinegosiasikan, daripada merupakan kewajiban hukum yang mengikat.

Secara keseluruhan, analisis terhadap dimensi *procedure-based genderwashing* mengungkapkan bahwa meskipun India memiliki kerangka kebijakan reservasi yang progresif di atas kertas, implementasi aktual dipenuhi dengan celah prosedural, mekanisme *enforcement* yang lemah, dan kurangnya dukungan sistematis yang memungkinkan perempuan terpilih untuk menjalankan kekuasaan substantif. Pengesahan *Women's Reservation Bill 2023* dengan klausul penundaan implementasi yang tidak terbatas merupakan contoh paling jelas dari bagaimana prosedur dapat dimanipulasi untuk memberikan kredit politik tanpa transformasi aktual dalam struktur kekuasaan gender. Fenomena *proxy leadership* yang persisten di tingkat Panchayat menunjukkan bahwa reservasi numerik tanpa dukungan kapasitas, perlindungan, dan *accountability* yang memadai tidak menghasilkan pemberdayaan sejati. Ketiadaan sub-reservasi untuk kelompok marginal mengabaikan realitas interseksionalitas diskriminasi dan berisiko memperkuat ketimpangan yang ada. Semua elemen ini bersama-sama menciptakan sistem yang secara prosedural memenuhi standar formal kesetaraan gender, tetapi dalam praktiknya mempertahankan dominasi patriarkal dan menggunakan perempuan sebagai instrumen legitimasi politik tanpa memberikan kekuasaan substantif kepada mereka.

3.2 *Prestige-Based Genderwashing*: Legitimasi Internasional melalui Narasi Kesetaraan Gender

Prestige-based genderwashing merujuk pada penggunaan isu kesetaraan gender untuk meningkatkan legitimasi dan reputasi internasional suatu rezim.

Pemerintah Modi secara strategis menggunakan kebijakan reservasi politik dan program pemberdayaan perempuan untuk membangun citra sebagai pemimpin progresif dalam isu gender di panggung global.

Pemerintah Modi secara aktif mempromosikan kebijakan reservasi Panchayat India sebagai "*best practice*" dalam forum-forum internasional. Dalam berbagai kesempatan, termasuk sidang *United Nations*, Modi menyoroti fakta bahwa India memiliki lebih dari 1,4 juta perempuan terpilih di tingkat lokal, menjadikannya negara dengan representasi perempuan tertinggi dalam pemerintahan lokal secara global (Ministry of External Affairs, 2019). Dalam pidatonya di *UN General Assembly* pada September 2019, Modi menyatakan bahwa "India telah memberdayakan lebih dari 1,3 juta perempuan melalui sistem *Panchayati Raj*, memberikan mereka peran kepemimpinan di tingkat akar rumput" dan menambahkan bahwa "ini adalah kontribusi India terhadap demokrasi partisipatif dan kesetaraan gender global" (Ministry of External Affairs, 2019). Narasi ini secara strategis mengabaikan tantangan implementasi dan kesenjangan antara representasi numerik dan pemberdayaan substantif.

Kompleksitas seperti fenomena *proxy leadership*, marginalisasi perempuan terpilih dalam proses pengambilan keputusan, dan persistensi norma patriarkal tidak dibahas dalam presentasi internasional ini. Dalam konteks di mana India menghadapi kritik internasional atas isu-isu seperti kebebasan pers yang menurun dari peringkat 140 pada 2014 menjadi 150 pada 2023 dalam *World Press Freedom Index* (Reporters Without Borders, 2023), pembatasan ruang sipil yang tercermin dalam penurunan status *Civil Liberties* dari 3/7 menjadi 4/7 dalam *Freedom House Score* (Freedom House, 2021), dan perlakuan terhadap minoritas Muslim yang

didokumentasikan dalam berbagai laporan *Human Rights Watch*, promosi pencapaian dalam kesetaraan gender berfungsi sebagai *counter narrative* yang mengalihkan perhatian dan meningkatkan legitimasi internasional rezim.

Pengesahan *Women's Reservation Bill* pada September 2023 diperlakukan sebagai momen bersejarah tidak hanya dalam politik domestik India tetapi juga sebagai pencapaian yang harus dirayakan secara global. Pemerintah Modi melakukan kampanye komunikasi internasional yang ekstensif untuk mempromosikan pengesahan ini. Modi sendiri mengumumkan pengesahan UU tersebut di forum G20 yang diadakan di India pada September 2023, memposisikannya sebagai bukti kepemimpinan India dalam isu kesetaraan gender global. Dalam pidatonya di G20 Summit, Modi menyatakan bahwa "India telah mengambil langkah bersejarah dengan mengalokasikan 33% kursi di parlemen untuk perempuan, menunjukkan komitmen kami terhadap Nari Shakti dan kesetaraan gender" (Press Information Bureau, 2023). Pernyataan ini disebarluaskan melalui jaringan diplomatik India dan media internasional yang meliput summit.

Kementerian Luar Negeri India mengeluarkan siaran pers ke berbagai negara, menekankan bahwa India telah menunjukkan komitmen konkret terhadap pemberdayaan politik perempuan dan bahwa keputusan ini menempatkan India sebagai pemimpin regional dan global dalam isu gender (Ministry of External Affairs, 2023). Siaran pers tersebut mengutip statistik tentang bagaimana reservasi 33% akan meningkatkan representasi perempuan di *Lok Sabha* dari sekitar 14% menjadi minimal 33%, dan menyebutnya sebagai "transformasi demokratis terbesar dalam sejarah modern India". Namun, narasi internasional ini tidak menyebutkan

fakta krusial bahwa implementasi UU ditunda untuk jangka waktu yang tidak pasti hingga selesainya proses delimitasi setelah sensus, kemungkinan hingga setelah M2030. Juga tidak dibahas bahwa UU yang sama telah tertunda di parlemen selama hampir tiga dekade sejak pertama kali diajukan pada 1996, dan pengesahannya pada 2023 terjadi dalam konteks di mana BJP memiliki mayoritas yang nyaman dan kontrol atas agenda legislatif yang memungkinkan mereka untuk meloloskan UU dengan klausul penundaan implementasi.

Pemerintah Narendra Modi secara konsisten menggunakan statistik tentang jumlah perempuan terpilih, jumlah *beneficiaries* program pemberdayaan perempuan, dan alokasi anggaran untuk isu perempuan untuk membangun narasi kemajuan yang mengesankan dalam forum internasional. Misalnya, data tentang 1,4 juta perempuan terpilih di Panchayat, 90 juta koneksi LPG gratis untuk perempuan melalui *Pradhan Mantri Ujjwala Yojana*, dan 55% perempuan sebagai pemilik rekening bank di bawah *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* sering dikutip dalam presentasi di *UN Commission on the Status of Women*, *World Economic Forum*, dan berbagai forum bilateral (Ministry of Panchayati Raj, 2023; Ministry of Petroleum and Natural Gas, 2023; Department of Financial Services, 2023). Angka- angka ini dipresentasikan tanpa konteks tentang kualitas, efektivitas, atau dampak transformatif dari program-program ini.

Dalam laporan National Review yang disampaikan India untuk Beijing+25 (25 tahun *Beijing Platform for Action*) pada 2020, pemerintah Modi secara ekstensif mendokumentasikan berbagai kebijakan dan program untuk perempuan, termasuk reservasi politik, skema kesejahteraan, dan inisiatif pemberdayaan ekonomi (*Ministry of Women and Child Development*, 2020). Laporan tersebut menyajikan

gambaran yang sangat optimis tentang kemajuan India dalam kesetaraan gender, menggunakan data kuantitatif untuk menunjukkan peningkatan dalam partisipasi perempuan di berbagai sektor. Namun, laporan ini tidak membahas secara kritis tantangan struktural seperti persistensi kekerasan terhadap perempuan yang meningkat dari 405.861 kasus pada 2020 menjadi 428.278 kasus pada 2021 (National Crime Records Bureau, 2022), kesenjangan upah gender yang tetap pada 19% (Monster India, 2022), atau penurunan India dalam *Global Gender Gap Index* dari peringkat 112 pada 2020 menjadi 127 pada 2023 (World Economic Forum, 2023).

Angka-angka kuantitatif tentang program pemberdayaan menciptakan *impression of scale* dan komitmen yang kuat, yang efektif dalam konteks internasional di mana audiens mungkin tidak familiar dengan kompleksitas konteks India. Misalnya, angka 90 juta *beneficiaries Ujjwala Yojana* terdengar mengesankan, namun mengaburkan fakta bahwa evaluasi program menunjukkan tingkat penggunaan berkelanjutan yang rendah karena biaya isi ulang yang tinggi, dengan banyak *beneficiaries* kembali menggunakan bahan bakar biomassa tradisional (Kar et al., 2019). Demikian pula, angka 55% kepemilikan rekening bank oleh perempuan tidak mencerminkan realitas bahwa banyak dari rekening ini memiliki saldo nol atau minimal dan dikontrol oleh anggota keluarga laki-laki (Pande et al., 2020).

India juga secara strategis menggunakan platform multilateral untuk memposisikan dirinya sebagai champion kesetaraan gender, terutama dalam konteks negara-negara berkembang. Selama presidensi G20 pada 2023, India mempromosikan tema "*Women-Led Development*" dan mengorganisir Women 20 (W20) *Summit* yang membawa bersama delegasi perempuan dari negara-negara

G20 untuk membahas isu pemberdayaan perempuan (Ministry of External Affairs, 2023). Modi dalam pidato pembukaannya menyatakan bahwa "India percaya pada pemberdayaan perempuan yang dipimpin oleh perempuan, bukan hanya untuk perempuan" dan mengklaim bahwa model India dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain (Press Information Bureau, 2023). Summit ini menghasilkan *W20 communiqué* yang menyoroti berbagai rekomendasi untuk kesetaraan gender, dan pemerintah India menggunakannya sebagai bukti kepemimpinan global dalam isu gender.

Tabel 3. Contoh Koordinasi Lintas - Lembaga dalam Platform-Based Genderwashing Pemerintah Modi

Lembaga	Platform Publikasi	Narasi yang dipublikasikan
<i>Press Information Bureau (PIB)</i>	Siaran pers nasional, situs pemerintahan	"Modi melindungi perempuan India" melalui program PMUY, BBBP dan Nari Shakti
<i>Ministry of Panchayati Raj</i>	Data online, laporan tahunan, media sosial	"India memiliki 1,4 juta perempuan terpilih di tingkat lokal"
<i>Ministry of External Affairs</i>	Forum PBB, G20, siaran pers internasional	"India di global memimpin kesetaraan gender"
BJP (Partai)	Kampanye pemilu, video testimonial	"Pilih BJP sama dengan memilih pemberdayaan perempuan"

Source: Disusun dari berbagai laporan kementerian dan PIB (2019-2023)

Strategi prestige-based *genderwashing* pemerintah Modi juga didukung oleh sinergi aktif antarlembaga pemerintahan dalam membangun ekosistem komunikasi narasi representasi perempuan. Pendekatan ini dapat disebut *platform-based genderwashing* melalui upaya terkoordinasi lintas lembaga pemerintahan

untuk mempublikasikan dan mempromosikan narasi representasi perempuan.

Berbeda dari sekadar menerbitkan kebijakan, pendekatan ini melibatkan sinergi aktif antarlembaga dalam membangun ekosistem komunikasi yang mendukung citra BJP dan Narendra Modi sebagai *champion* kesetaraan gender. Pada level lembaga kepresidenan dan eksekutif, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (*Ministry of Women and Child Development/MWCD*) secara rutin merilis laporan tahunan yang menonjolkan statistik keterwakilan perempuan di berbagai program pemerintah. Laporan-laporan ini kemudian didistribusikan melalui *Press Information Bureau* (PIB) ke seluruh media nasional, menciptakan narasi yang konsisten tentang "kemajuan perempuan" di bawah kepemimpinan Modi.

Lebih jauh, *Ministry of Panchayati Raj* secara aktif memublikasikan data tentang 1,4 juta perempuan terpilih di tingkat *Panchayat* melalui berbagai kanal digital, termasuk situs resmi, media sosial, dan siaran pers periodik. Data ini dirancang untuk dikonsumsi baik oleh audiens domestik maupun internasional. Kementerian Luar Negeri India (*Ministry of External Affairs*) kemudian menggunakan statistik yang sama dalam presentasi di forum-forum multilateral seperti UN Commission on the Status of Women dan G20 Summit (Ministry of External Affairs, 2023). Selama presidensi G20 India pada 2023, sinergi antarlembaga ini mencapai puncaknya. Modi secara pribadi mengumumkan pengesahan Undang-Undang Reservasi Perempuan di forum G20, dan Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan siaran pers ke berbagai negara yang menyebutnya sebagai "transformasi demokratis terbesar dalam sejarah modern India" (Ministry of External Affairs, 2023). Narasi ini direplikasi oleh seluruh jaringan diplomatik India di luar negeri. Namun, kritikus menunjukkan bahwa

banyak dari rekomendasi dalam W20 *communiqué* tidak tercermin dalam kebijakan domestik India sendiri, dan bahwa penggunaan platform internasional untuk mempromosikan narasi pemberdayaan berfungsi terutama untuk legitimasi *prestige* daripada komitmen substantif untuk transformasi (Nair, 2023). Kontradiksi ini sangat terlihat dalam konteks di mana perempuan aktivis dan organisasi masyarakat sipil yang bekerja pada isu gender di India menghadapi pembatasan yang meningkat melalui regulasi seperti *Foreign Contribution Regulation Act* (FCRA) yang membekukan lisensi ratusan NGO yang bekerja pada hak perempuan (Amnesty International, 2020).

Meskipun promosi internasional yang intensif tentang pencapaian gender, indikator objektif menunjukkan bahwa status hak perempuan di India tidak mengalami perbaikan signifikan, dan dalam beberapa aspek malah memburuk selama periode 2019-2024. Data dari *National Crime Records Bureau* menunjukkan peningkatan konsisten dalam kejahatan terhadap perempuan, dari 405.861 kasus pada 2020 menjadi 428.278 kasus pada 2021, dengan peningkatan khususnya dalam kategori perkosaan yang meningkat dari 28.046 kasus menjadi 31.677 kasus, dan *cruelty by husband or his relatives* yang meningkat dari 103.272 kasus menjadi 113.403 kasus (National Crime Records Bureau, 2022).

Peningkatan ini terjadi bersamaan dengan periode di mana pemerintah Modi secara aktif mempromosikan narasi pemberdayaan perempuan di forum internasional. Partisipasi angkatan kerja perempuan (FLFPR), meskipun meningkat dari 23,3% pada 2017-18 menjadi 32,8% pada 2022-23, masih jauh lebih rendah dari rata-rata global sebesar 47,7% dan rata-rata Asia Selatan sebesar 24,4% (National Statistical Office, 2023; International Labour Organization, 2023). Lebih kritis, sebagian besar peningkatan ini terjadi dalam sektor informal, pertanian

subsisten, dan pekerjaan dengan upah rendah tanpa perlindungan sosial, bukan dalam pekerjaan berkualitas yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi sejati. Kesenjangan upah gender tetap persisten pada 19%, dan dalam beberapa sektor seperti manufaktur mencapai 34% (Monster India, 2022; International Labour Organization, 2022). India juga mengalami penurunan dalam berbagai indeks internasional terkait kesetaraan gender.

Dalam *Global Gender Gap Index* 2023, India berada di peringkat 127 dari 146 negara, menunjukkan kemunduran dari peringkat 108 pada 2018, dengan skor yang menurun khususnya dalam dimensi *economic participation and opportunity* (World Economic Forum, 2023). Dalam *Gender Inequality Index* yang dipublikasikan oleh UNDP, India berada di peringkat 122 dari 191 negara pada 2021, dengan skor 0,490 yang menunjukkan tingkat ketimpangan gender yang tinggi (United Nations Development Programme, 2022). Kontradiksi antara narasi *prestige-based* yang dipromosikan di forum internasional dan realitas indikator objektif mengungkapkan sifat superficial dari komitmen rezim terhadap kesetaraan gender.

Lebih lanjut, penggunaan isu gender untuk legitimasi internasional oleh pemerintah Narendra Modi terjadi dalam konteks yang lebih luas dari *strategic positioning* India dalam tatanan global. Dalam konteks kompetisi dengan China untuk pengaruh regional dan global, promosi model demokratis India yang "inklusif" termasuk dalam aspek gender menjadi bagian dari *soft power strategy* (Pande, 2021). India berusaha membedakan dirinya dari China dengan menekankan karakter demokratis dan komitmen terhadap hak asasi manusia termasuk hak perempuan, meskipun praktik domestik tidak selalu konsisten dengan narasi ini. Penggunaan isu gender untuk *geopolitical positioning* ini mengungkapkan bahwa

motivasi di balik promosi kebijakan gender bukan semata-mata komitmen terhadap kesetaraan, tetapi juga kepentingan strategis dalam kompetisi kekuatan global.

3.3 *Performance-Based Genderwashing: Kampanye Simbolik untuk Legitimasi Elektoral*

Performance-based genderwashing merujuk pada penggunaan program dan kampanye pemberdayaan perempuan untuk membangun dukungan elektoral dan legitimasi domestik, dengan fokus pada visibilitas tinggi daripada dampak substantif.

Program *Beti Bachao Beti Padhao* (BBBP), yang diluncurkan pada 2015 dan dipromosikan secara agresif selama periode 2019-2024, merupakan contoh klasik *performance-based genderwashing*. Program ini bertujuan mengatasi penurunan rasio jenis kelamin anak (*Child Sex Ratio/CSR*) dan mempromosikan pendidikan anak perempuan (*Ministry of Women and Child Development*, 2015). Objektif program ini sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi adalah "(i) mencegah diskriminasi berbasis gender dan eliminasi *female foeticide*, (ii) memastikan kelangsungan hidup dan perlindungan anak perempuan, dan (iii) memastikan pendidikan dan partisipasi anak perempuan" (*Ministry of Women and Child Development*, 2015). BBBP menjadi salah satu program paling visible dari pemerintah Modi melalui kampanye media dan iklan yang masif. Iklan-iklan BBBP muncul di televisi nasional, radio, media cetak, billboard di seluruh negara, dan platform digital, menampilkan Modi sebagai champion bagi anak perempuan India.

Namun, audit *Comptroller and Auditor General* (CAG) pada 2022 mengungkapkan bahwa 56% dari total alokasi dana BBBP selama periode 2014-2020 dihabiskan untuk iklan dan publisitas, bukan untuk intervensi substantif di

lapangan (*Comptroller and Auditor General*, 2022). Dari total alokasi Rs. 749 crore (sekitar US\$ 90 juta) selama periode tersebut, Rs. 420 crore (sekitar US\$ 50 juta) digunakan untuk media *advocacy* dan kampanye komunikasi, sementara hanya Rs. 329 crore (sekitar US\$ 39 juta) dialokasikan untuk implementasi program di 405 distrik prioritas (*Comptroller and Auditor General*, 2022). Audit juga menemukan bahwa banyak distrik prioritas tidak menunjukkan perbaikan signifikan dalam *Child Sex Ratio*, dan dalam beberapa kasus bahkan mengalami penurunan lebih lanjut. Misalnya, di Haryana, salah satu negara bagian dengan CSR terendah (834 perempuan per 1000 laki-laki pada 2011), CSR hanya meningkat menjadi 838 pada 2018 meskipun program telah berjalan selama empat tahun (Census of India, 2011; *Ministry of Women and Child Development*, 2019).

Evaluasi dampak yang dilakukan oleh berbagai organisasi independen menunjukkan bahwa program ini gagal mencapai target perbaikan *sex ratio* yang signifikan di banyak distrik prioritas. Rasio publisitas terhadap implementasi substantif dalam BBBP mengungkapkan prioritas pemerintah yaitu menciptakan praktik *dowry*, dan ketimpangan ekonomi gender yang struktural (John, 2020). Penelitian etnografis di distrik-distrik implementasi BBBP menunjukkan bahwa meskipun kesadaran tentang program meningkat karena kampanye media yang intensif, norma sosial dan praktik diskriminatif terhadap anak perempuan tidak mengalami perubahan signifikan karena kurangnya intervensi berbasis komunitas yang mendalam (Pande & Malhotra, 2021).

Pradhan Mantri Ujjwala Yojana (PMUY), yang mendistribusikan koneksi gas LPG gratis kepada perempuan dari keluarga miskin, menjadi *showcase* program pemerintah Modi. Skema ini diluncurkan pada Mei 2016 dengan target awal memberikan 50 juta koneksi LPG gratis kepada perempuan *Below Poverty Line*

(BPL) dalam waktu tiga tahun (Ministry of Petroleum and Natural Gas, 2016). Target ini kemudian diperluas, dan hingga 2023, lebih dari 90 juta koneksi telah didistribusikan dengan total anggaran sekitar Rs. 12,800 crore (sekitar US\$ 1,5 miliar) (Ministry of Petroleum and Natural Gas, 2023). Program ini dipromosikan sebagai upaya untuk "membebaskan" perempuan dari kerja domestik berat memasak dengan bahan bakar biomassa dan polusi udara dalam ruangan yang membahayakan kesehatan.

Modi secara pribadi hadir dalam acara-acara distribusi koneksi LPG di berbagai negara bagian, menciptakan visibilitas politik tinggi dan mengasosiasikan dirinya secara langsung dengan "pemberian" kepada perempuan. Dalam pidato-pidatonya, Modi sering menyebut *Ujjwala* sebagai program yang "mengembalikan martabat kepada perempuan India" dan "membebaskan mereka dari asap dapur yang berbahaya" (Press Information Bureau, 2019). Gambar Modi menyerahkan koneksi LPG kepada perempuan *beneficiaries* menjadi konten kampanye *electoral* yang ekstensif digunakan dalam pemilu 2019 dan pemilu negara bagian selanjutnya.

Namun, evaluasi dampak independen mengungkapkan bahwa banyak *beneficiaries* tidak menggunakan LPG secara berkelanjutan karena biaya isi ulang yang tinggi. Penelitian oleh *Council on Energy, Environment and Water* (CEEW) pada 2019 menemukan bahwa 43% dari *beneficiaries* PMUY tidak melakukan isi ulang setelah menggunakan silinder LPG gratis pertama mereka, dan kembali menggunakan bahan bakar biomassa tradisional seperti kayu dan kotoran hewan (Kar et al., 2019). Biaya isi ulang silinder 14,2 kg berkisar antara Rs. 900-1000 (sekitar US\$ 11-12), yang merupakan beban finansial signifikan bagi keluarga BPL yang rata-rata pendapatannya kurang dari Rs. 5000 per bulan (sekitar US\$ 60). Meskipun pemerintah memberikan subsidi untuk isi ulang, jumlahnya tidak cukup

untuk membuat LPG terjangkau secara konsisten bagi keluarga miskin.

Lebih kritis, program ini dapat dipandang sebagai memperkuat peran domestik tradisional perempuan tanpa menantang pembagian kerja gender yang tidak setara atau meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. PMUY fokus pada meningkatkan kondisi kerja domestik perempuan, bukan pada memberdayakan mereka secara ekonomi atau mengubah ekspektasi sosial bahwa memasak adalah tanggung jawab eksklusif perempuan (Agarwal, 2020). Penelitian tentang dampak gender dari program LPG menunjukkan bahwa meskipun ada manfaat kesehatan dari pengurangan paparan asap, program tidak menghasilkan peningkatan dalam waktu yang tersedia untuk perempuan untuk aktivitas produktif atau pendidikan karena waktu yang dihemat dari memasak sering dialokasikan untuk pekerjaan domestik lainnya (Gould & Urpelainen, 2020).

PMUY merupakan contoh bagaimana *welfare provision* yang memberikan manfaat material praktis dikemas sebagai "pemberdayaan perempuan" untuk tujuan elektoral, tanpa addressing struktur ketimpangan gender yang lebih dalam. Program ini menciptakan basis dukungan elektoral yang kuat di antara perempuan dari keluarga miskin yang menghargai bantuan konkret, dan pemerintah BJP secara efektif mengkapitalisasi ini dalam kampanye pemilu dengan narasi bahwa Modi peduli terhadap perempuan miskin India.

Program *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana* (PMJDY) untuk financial inclusion juga dijadikan narasi pemberdayaan perempuan. PMJDY diluncurkan pada Agustus 2014 dengan tujuan memastikan akses universal terhadap layanan perbankan, termasuk pembukaan rekening bank dasar tanpa biaya, kartu debit RuPay, dan akses ke kredit mikro (Department of Financial Services, 2014). Hingga 2023, lebih dari 470 juta rekening telah dibuka di bawah skema ini dengan total

deposit mencapai Rs. 1,77 lakh crore (sekitar US\$ 21 miliar) (Department of Financial Services, 2023).

Pemerintah Narendra Modi secara rutin menyoroti fakta bahwa 55% dari rekening PMJDY dimiliki oleh perempuan, dan menggunakan statistik ini sebagai bukti komitmen terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan (Department of Financial Services, 2023). Modi dalam pidato-pidatonya menyebut PMJDY sebagai "revolusi finansial yang memberdayakan perempuan India dengan memberikan mereka kendali atas sumber daya keuangan" (Press Information Bureau, 2021). Kepemilikan rekening bank direpresentasikan sebagai indikator pemberdayaan ekonomi perempuan dan inklusi finansial yang mencerminkan transformasi struktur ekonomi gender.

Namun, penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan rekening tidak selalu berarti kontrol aktual atas sumber daya keuangan. Studi oleh Pande et al. (2020) yang dilakukan di *Uttar Pradesh*, *Bihar*, dan *Madhya Pradesh* menemukan bahwa dalam 60% kasus, rekening atas nama perempuan digunakan dan dikontrol oleh anggota keluarga laki-laki, terutama suami atau ayah. Perempuan sering tidak mengetahui saldo rekening mereka, tidak memiliki akses fisik ke kartu debit atau PIN, dan tidak terlibat dalam keputusan tentang bagaimana uang dalam rekening digunakan (Pande et al., 2020). Dalam banyak kasus, rekening dibuka atas nama perempuan untuk menerima transfer langsung dari skema kesejahteraan pemerintah seperti subsidi gas atau beras, tetapi uang tersebut segera ditarik oleh anggota keluarga laki-laki tanpa konsultasi dengan pemilik rekening nominal.

Lebih lanjut, banyak dari rekening PMJDY memiliki saldo nol atau minimal. Data dari Reserve Bank of India menunjukkan bahwa hingga 2022, sekitar 46% dari total rekening PMJDY adalah "*zero-balance accounts*" yang tidak

memiliki transaksi apa pun dalam enam bulan terakhir (Reserve Bank of India, 2022). Ini menunjukkan bahwa meskipun akses formal terhadap layanan perbankan telah meningkat, banyak rekening tidak digunakan secara aktif untuk transaksi ekonomi atau tabungan yang berkontribusi pada pemberdayaan finansial sejati. Fokus pada angka kepemilikan rekening daripada kualitas penggunaan dan dampak terhadap otonomi ekonomi perempuan mengungkapkan prioritas pada *metrics* yang mudah dipromosikan daripada transformasi substantif.

Konsep "*Nari Shakti*" (kekuatan perempuan) menjadi *central theme* dalam retorika dan kampanye politik Modi sejak 2014 dan diperkuat selama periode 2019-2024. Dalam pidato-pidatonya, Modi secara rutin menekankan komitmen pemerintahan terhadap pemberdayaan perempuan dan mengklaim bahwa berbagai program pemerintah telah mentransformasi kehidupan jutaan perempuan India. Narasi "*Nari Shakti*" dikonstruksikan sebagai visi holistik yang mencakup pemberdayaan ekonomi, politik, sosial, dan kesehatan perempuan (Press Information Bureau, 2022). Modi sering menggunakan frasa seperti "perempuan adalah kekuatan India" dan "masa depan India adalah *Nari Shakti*" dalam pidato domestik dan internasional.

Kampanye pemilu BJP pada 2019 dan dalam pemilu negara bagian selanjutnya secara ekstensif menggunakan narasi pemberdayaan perempuan. Materi kampanye menampilkan testimonial dari *beneficiaries* program seperti *Ujjwala*, *Jan Dhan Yojana*, dan skema subsidi lainnya, menciptakan narasi bahwa Modi dan BJP adalah champions sejati bagi perempuan India. Video kampanye menampilkan perempuan dari berbagai negara bagian dan latar belakang sosial ekonomi yang menceritakan bagaimana program pemerintah telah mengubah hidup mereka, dengan pesan bahwa memilih BJP adalah memilih untuk pemberdayaan perempuan

berkelanjutan (Bharatiya Janata Party, 2019).

Namun, narasi "*Nari Shakti*" ini berdampingan dengan praktik dan kebijakan yang kontradiktif. Periode 2019-2024 juga menyaksikan peningkatan upaya untuk mengatur moralitas dan tubuh perempuan melalui kampanye seperti "*love jihad*" dan undang-undang anti-konversi di negara bagian yang dikuasai BJP. Narasi "*love jihad*" mengklaim adanya konspirasi sistematis oleh laki-laki Muslim untuk menikahi perempuan Hindu dengan tujuan mengkonversi mereka ke Islam, dan telah digunakan untuk membenarkan intervensi negara dalam pilihan pernikahan perempuan (Agnes, 2021). Negara bagian seperti *Uttar Pradesh*, *Madhya Pradesh*, *Haryana*, dan *Karnataka* yang dikuasai BJP telah mengesahkan atau berusaha mengesahkan undang-undang yang membatasi hak perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka, dengan mengharuskan persetujuan pemerintah untuk pernikahan antar-agama.

The Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance 2020 misalnya, mengharuskan individu yang ingin mengkonversi agama mereka untuk memberikan pemberitahuan dua bulan sebelumnya kepada *District Magistrate*, dan memuat ketentuan pidana hingga 10 tahun penjara untuk "*forced conversion*" (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Ordinance, 2020). Meskipun undang-undang ini diklaim melindungi perempuan dari konversi paksa, dalam praktiknya telah digunakan untuk mengintimidasi pasangan antar-agama dan membatasi otonomi perempuan dalam membuat keputusan tentang pernikahan dan agama mereka. Kontradiksi antara narasi "*Nari Shakti*" yang menekankan pemberdayaan dan otonomi perempuan dengan kebijakan yang membatasi kebebasan memilih mereka mengungkapkan bahwa narasi pemberdayaan berfungsi terutama untuk legitimasi elektoral daripada

komitmen sejati terhadap hak perempuan.

Meskipun retorika dan visibilitas tinggi program pemberdayaan perempuan, analisis anggaran mengungkapkan bahwa alokasi aktual untuk program-program spesifik perempuan tetap terbatas dan tidak proporsional dengan skala masalah yang dihadapi perempuan India. *Centre for Budget and Governance Accountability* (CBGA) dalam analisisnya tentang *Gender Budget Statement* (GBS) 2022-23 mencatat bahwa meskipun total alokasi yang diklaim untuk program gender mencapai Rs. 1,84 lakh crore (sekitar US\$ 22 miliar), hanya sebagian kecil dari ini yang merupakan program 100% untuk perempuan (Centre for Budget and Governance Accountability, 2022). Mayoritas alokasi adalah untuk program yang memiliki komponen perempuan tetapi tidak eksklusif untuk perempuan, seperti skema kesehatan umum atau pendidikan yang memiliki persentase *beneficiaries* perempuan tetapi tidak dirancang khusus untuk mengatasi ketimpangan gender struktural.

CBGA juga mengkritik kurangnya transparansi dalam *Gender Budget Statement*, mencatat bahwa kategorisasi program sebagai "*gender-responsive*" sering tidak jelas dan tidak didukung oleh *gender impact assessment* yang *rigorous* (Centre for Budget and Governance Accountability, 2022). Misalnya, alokasi untuk konstruksi toilet di bawah *Swachh Bharat Abhiyan* dikategorikan sebagai program gender meskipun tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa perempuan terlibat dalam perencanaan, desain, atau pengawasan konstruksi toilet, atau bahwa toilet memenuhi kebutuhan spesifik perempuan dan anak perempuan.

Lebih lanjut, alokasi untuk institusi dan mekanisme yang penting untuk penegakan hak perempuan, seperti *National Commission for Women* (NCW) dan mekanisme *grievance redressal*, tidak mengalami peningkatan signifikan yang

sebanding dengan skala masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Alokasi anggaran untuk NCW pada 2022-23 adalah hanya Rs. 30 crore (sekitar US\$ 3,6 juta), jumlah yang sangat kecil mengingat mandat NCW untuk menangani keluhan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan di negara dengan populasi lebih dari 650 juta perempuan (Union Budget, 2022-23). Kesenjangan antara visibilitas program dan alokasi anggaran substantif mengungkapkan bahwa prioritas pemerintah adalah pada *creating impression of commitment* daripada investing dalam transformasi struktural yang diperlukan untuk kesetaraan gender sejati.

Analisis komprehensif terhadap tiga dimensi *autocratic genderwashing* *procedure-based*, *prestige-based*, dan *performance-based* mengungkapkan pola sistematis di mana pemerintahan Modi menggunakan isu kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan sebagai instrumen legitimasi politik tanpa komitmen substantif terhadap transformasi struktural. Kebijakan dan program yang dipromosikan sebagai pemberdayaan perempuan sering bersifat simbolik, fokus pada visibilitas dan angka kuantitatif daripada dampak transformatif, dan dirancang untuk menghasilkan keuntungan politik elektoral dan reputasi internasional tanpa mengganggu struktur kekuasaan patriarkal yang mendasar. Kesenjangan antara retorika pemberdayaan dan realitas implementasi, kontradiksi antara narasi "*Nari Shakti*" dan kebijakan yang membatasi otonomi perempuan, serta prioritas pada kampanye publisitas daripada intervensi substantif semuanya mengkonfirmasi bahwa praktik *genderwashing* adalah karakteristik sentral dari pendekatan pemerintahan Modi terhadap isu gender selama periode 2019-2024 *perception of action* daripada *addressing root causes* dari preferensi anak laki-laki.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik *autocratic genderwashing* dalam implementasi kebijakan politik perempuan di India pada masa pemerintahan Narendra Modi periode 2019-2024. Dengan menggunakan kerangka konseptual *autocratic genderwashing* dari Bjarnegård dan Zetterberg (2022), penelitian ini menelaah bagaimana kebijakan yang secara normatif tampak progresif dan berpihak pada kesetaraan gender justru berpotensi dimanfaatkan sebagai instrumen legitimasi politik dalam konteks kemunduran demokrasi dan konsolidasi kekuasaan eksekutif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan politik perempuan di India pada periode tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap pemberdayaan perempuan yang substantif. Meskipun pemerintah India di bawah kepemimpinan Narendra Modi secara aktif mempromosikan narasi kesetaraan gender dan peningkatan representasi perempuan, realitas implementasi kebijakan menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara retorika dan praktik. Kesenjangan ini menjadi indikasi kuat dari praktik *genderwashing*, khususnya dalam konteks pemerintahan dengan kecenderungan otoriter.

Pada dimensi *procedure-based genderwashing*, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme formal kebijakan reservasi politik perempuan dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu struktur kekuasaan patriarkal yang

sudah mapan. Pengesahan *Women's Reservation Bill* (Nari Shakti Vandan Adhiniyam) pada tahun 2023 menjadi contoh paling menonjol. Meskipun pengesahan ini dipresentasikan sebagai pencapaian historis dalam perjuangan hak politik perempuan, klausul penundaan implementasi hingga selesainya proses sensus dan delimitasi menunjukkan bahwa kebijakan tersebut lebih bersifat simbolik daripada transformatif. Penundaan ini memungkinkan pemerintah memperoleh legitimasi politik tanpa harus menghadapi konsekuensi nyata berupa redistribusi kekuasaan politik dalam waktu dekat. Selain itu, dominasi kandidat perempuan dari dinasti politik atau keluarga elite memperkuat temuan bahwa representasi perempuan sering kali bersifat prosedural dan tidak diiringi dengan otonomi politik yang nyata.

Pada dimensi *prestige-based genderwashing*, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah India secara konsisten menggunakan isu keterwakilan perempuan sebagai alat diplomasi dan pencitraan internasional. Keberhasilan kuantitatif dalam meningkatkan jumlah perempuan di tingkat Panchayat dan lembaga lokal kerap ditampilkan dalam forum internasional sebagai bukti kemajuan kesetaraan gender. Namun, narasi tersebut tidak mencerminkan kondisi substantif di lapangan, di mana perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pengambilan keputusan, sumber daya, dan perlindungan politik. Strategi ini memungkinkan India mempertahankan citra sebagai negara demokratis dan progresif di mata komunitas internasional, sekaligus mengalihkan perhatian dari kemunduran demokrasi, pembatasan ruang sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi secara bersamaan.

Sementara itu, pada dimensi *performance-based genderwashing*, penelitian ini menemukan bahwa berbagai program pemberdayaan perempuan yang

dikampanyekan pemerintah seperti *Beti Bachao Beti Padhao* lebih berfungsi sebagai alat mobilisasi politik dan legitimasi elektoral daripada sebagai instrumen perubahan struktural. Program-program tersebut sering kali menekankan aspek simbolik dan retorik, tanpa dukungan kebijakan lanjutan yang memadai untuk mengatasi akar permasalahan ketimpangan gender, seperti rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, tingginya angka kekerasan berbasis gender, serta kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan. Dalam konteks pembatasan ruang sipil dan melemahnya kebebasan pers, narasi keberhasilan ini sulit untuk dikritisi secara terbuka, sehingga semakin memperkuat praktik *genderwashing*.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan politik perempuan di India pada periode 2019-2024 mencerminkan pola *autocratic genderwashing*, di mana isu kesetaraan gender digunakan sebagai instrumen legitimasi politik dalam konteks pemerintahan yang semakin terpusat dan otoriter. Peningkatan representasi perempuan secara numerik tidak secara otomatis berbanding lurus dengan peningkatan representasi substantif dan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, kebijakan reservasi politik yang dijalankan pada periode ini lebih mencerminkan strategi simbolik daripada komitmen terhadap transformasi struktural yang berkeadilan gender.

Temuan ini memiliki implikasi penting bagi studi hubungan internasional dan politik gender, khususnya dalam memahami bagaimana rezim dengan kecenderungan otoriter dapat mengadopsi agenda kesetaraan gender secara selektif untuk memperkuat legitimasi domestik dan internasional, tanpa mengubah relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, analisis terhadap kebijakan gender perlu selalu ditempatkan dalam konteks politik yang lebih luas, termasuk dinamika demokrasi, kekuasaan, dan ruang sipil.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diajukan baik pada tataran kebijakan maupun pemerintahannya. Pertama, bagi pemerintah India, diperlukan komitmen politik yang lebih kuat untuk memastikan bahwa kebijakan reservasi politik perempuan tidak berhenti pada tataran simbolik. Implementasi *Women's Reservation Bill* perlu dipercepat dengan menghilangkan penundaan yang tidak esensial, serta disertai dengan mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa perempuan yang terpilih memiliki otonomi dan kapasitas politik yang nyata. Pemerintah juga perlu memperkuat kebijakan pendukung, seperti pelatihan kepemimpinan politik perempuan, perlindungan dari intimidasi politik, serta akses terhadap sumber daya dan jaringan politik yang setara.

Kedua, partai politik memiliki peran strategis dalam mencegah praktik *procedure-based genderwashing*. Partai perlu mengadopsi mekanisme rekrutmen dan kaderisasi yang lebih inklusif dan transparan, sehingga keterwakilan perempuan tidak didominasi oleh dinasti politik atau elite tertentu. Tanpa reformasi internal partai, kebijakan reservasi berisiko terus mereproduksi ketimpangan gender dalam bentuk yang baru.

Ketiga, komunitas internasional dan organisasi global perlu mengembangkan indikator evaluasi kesetaraan gender yang tidak hanya berfokus pada aspek kuantitatif, tetapi juga pada kualitas partisipasi dan representasi substantif. Pendekatan ini penting untuk mencegah negara-negara menggunakan narasi kesetaraan gender sebagai alat pencitraan tanpa perubahan nyata. Tekanan diplomatik dan kerja sama internasional sebaiknya diarahkan pada penguatan institusi demokratis dan perlindungan ruang sipil sebagai prasyarat utama bagi

pemberdayaan perempuan.

Keempat, bagi organisasi masyarakat sipil dan gerakan perempuan di India, penelitian ini menekankan pentingnya memperjuangkan ruang kritik dan akuntabilitas terhadap kebijakan gender pemerintah. Meskipun ruang sipil mengalami penyempitan, solidaritas lintas kelompok, pendekatan interseksional, dan pemanfaatan jaringan internasional dapat menjadi strategi alternatif untuk melawan narasi *genderwashing* dan mendorong perubahan yang lebih substantif.

Kelima, bagi pengembangan studi akademik, penelitian ini merekomendasikan agar kajian tentang gender dan politik tidak dilepaskan dari analisis rezim dan dinamika kekuasaan. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi komparatif antar negara atau antar rezim untuk melihat bagaimana praktik *autocratic genderwashing* muncul dalam konteks yang berbeda. Selain itu, penelitian dengan pendekatan empiris berbasis studi lapangan juga penting untuk menggali pengalaman perempuan politisi secara langsung dalam menghadapi struktur patriarkal dan otoritarian.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami relasi antara gender, demokrasi, dan kekuasaan, serta mendorong perumusan kebijakan politik perempuan yang tidak hanya progresif secara normatif, tetapi juga transformatif secara substantif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agarwal, Bina. 2020. "Does Clean Energy Empower Women? Evidence from Rural India." *World Development* 136: 105071.
- Agnes, Flavia. 2019. "The Anti-Muslim Thrust of the Campaign against Triple Talaq." *Economic and Political Weekly* 54 (7): 21-24.
- Agnes, Flavia. 2021. "The BJP's Love Jihad Campaign and Its Implications for Women's Rights." *Economic and Political Weekly* 56 (15): 12-15.
- Amnesty International. 2020. *India: Government Clampdown on NGOs Receiving Foreign Funding*. Amnesty International Report.
- Ban, Radu, and Vijayendra Rao. 2008. "Tokenism or Agency? The Impact of Women's Reservations on Village Democracies in South India." *Economic Development and Cultural Change* 56 (3): 501-530.
- Beaman, Lori A., Esther Duflo, Rohini Pande, and Petia Topalova. 2012. "Female Leadership Raises Aspirations and Educational Attainment for Girls: A Policy Experiment in India." *Science* 335 (6068): 582-586.
- Bharatiya Janata Party. 2019. *Sankalp Patra: BJP Election Manifesto 2019*. New Delhi: BJP.
- Bhavnani, Rikhil R. 2009. "Do Electoral Quotas Work after They Are Withdrawn? Evidence from a Natural Experiment in India." *American Political Science Review* 103 (1): 23-35.
- Bjarnegård, Elin, and Pär Zetterberg. 2022. "How Autocrats Weaponize Women's Rights." *Journal of Democracy* 33 (2): 64-77.
- Buch, Nirmala. 2009. "Women's Experience in New Panchayats: The Emerging Leadership of Rural Women." *Occasional Paper Series* 35. Centre for Women's Development Studies.
- Cassan, Guilhem, and Lore Vandewalle. 2017. "Identities and Public Policies: Unintended Effects of Political Reservations for Women in India." *CSAE Working Paper Series* WPS/2017-14.
- Census of India. 2011. *Child Sex Ratio in India*. Office of the Registrar General & Census Commissioner, India.

- Centre for Budget and Governance Accountability. 2022. *Analysis of Gender Budget Statement 2022-23*. New Delhi: CBGA.
- Centre for Media Studies. 2019. *Campaign Finance and Electoral Expenditure in India*. New Delhi: CMS.
- Chattopadhyay, Raghabendra, and Esther Duflo. 2004. "Women as Policy Makers: Evidence from a Randomized Policy Experiment in India." *Econometrica* 72 (5): 1409-1443.
- Chatterji, Angana P., Thomas Blom Hansen, and Christophe Jaffrelot, eds. 2019. *Majoritarian State: How Hindu Nationalism Is Changing India*. Oxford: Oxford University Press.
- Chaudhary, M. 2012. "Women in Politics: Myths and Realities." *The Indian Journal of Political Science* 73 (2): 309-320.
- Chowdhury, R. 2020. "Violence against Women in Local Governance: Evidence from Haryana." *Economic and Political Weekly* 55 (28): 41-46.
- Comptroller and Auditor General of India. 2022. *Performance Audit Report on Beti Bachao Beti Padhao Scheme*. New Delhi: CAG.
- Constitution of India. 1950. *The Constitution of India*. Government of India.
- Constitutional Conduct Group. 2023. *Analysis of Women's Reservation Bill 2023*. New Delhi: CCG.
- Deccan Herald. 2024. "Rising Crimes against Women in India." January 10.
- Dehalwar, K., and S. N. Sharma. 2024. "Gender and Caste in Indian Political Reservations." *Journal of South Asian Development* 19 (1): 45-67.
- Department of Financial Services. 2014. *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana Guidelines*. Ministry of Finance, Government of India.
- Department of Financial Services. 2023. *Progress Report on Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana*. Ministry of Finance, Government of India.
- Deshpande, Ashwini, and Rajesh Ramachandran. 2019. "Traditional Hierarchies and Affirmative Action in a Globalizing Economy." *World Development* 115: 228-245.
- Deshpande, Ashwini, and Thomas E. Weisskopf. 2014. "Does Affirmative Action Reduce Productivity? A Case Study of the Indian Railways." *World Development* 64: 169-180.

- Election Commission of India. 2019. *Statistical Report on General Elections 2019 to Lok Sabha*. New Delhi: ECI.
- Freedom House. 2021. *Freedom in the World 2021: India*. Washington, DC: Freedom House.
- Gould, Courtney F., and Johannes Urpelainen. 2020. “The Gendered Nature of Liquefied Petroleum Gas Stove Adoption and Use in Rural India.” *Journal of Development Studies* 56 (7): 1309-1329.
- Human Rights Watch. 2020. *India: Activists, Critics Targeted with Terrorism Law*. Human Rights Watch Report.
- Human Rights Watch. 2021. *India: Politically Motivated Investigations and Prosecutions*. Human Rights Watch Report.
- Inter-Parliamentary Union. 2023. *Women in National Parliaments: World Average*. Geneva: IPU.
- International Labour Organization. 2022. *Global Wage Report 2022-2023*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. 2023. *World Employment and Social Outlook: Trends 2023*. Geneva: ILO.
- Jaffrelot, Christophe. 2021. *Modi’s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy*. Princeton: Princeton University Press.
- Jayal, Niraja Gopal. 2005. *The Gentle Leviathan: Welfare and the Indian State*. Oxford: Oxford University Press.
- Jensenius, Francesca R. 2016. *Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India*. Oxford: Oxford University Press.
- John, Mary E. 2020. “Interrogating the Rhetoric of Demographic Transition: Lessons from India’s Population Policies.” *Reproductive Health Matters* 28 (1): 1-10.
- Kar, Anumita, Shonali Pachauri, Rob Bailis, and Hisham Zerriffi. 2019. “Using Sales Data to Assess Cooking Gas Adoption and the Impact of India’s Ujjwala Programme in Rural Karnataka.” *Nature Energy* 4 (9): 806-814.
- Mander, Harsh. 2018. *Looking Away: Inequality, Prejudice and Indifference in New India*. New Delhi: Speaking Tiger.

- Menon, Nivedita. 2023. "Women's Reservation Bill: A Critical Assessment." *Economic and Political Weekly* 58 (40): 10-13.
- Ministry of External Affairs. 2019. *Prime Minister's Statement at the 74th Session of the United Nations General Assembly*. Government of India.
- Ministry of External Affairs. 2023. *India's G20 Presidency: Outcomes and Achievements*. Government of India.
- Ministry of Panchayati Raj. 2022. *Annual Report 2021-2022*. Government of India.
- Ministry of Panchayati Raj. 2023. *Status of Women's Representation in Panchayati Raj Institutions*. Government of India.
- Ministry of Petroleum and Natural Gas. 2016. *Pradhan Mantri Ujjwala Yojana Scheme Guidelines*. Government of India.
- Ministry of Petroleum and Natural Gas. 2023. *Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: Achievement Report*. Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. 2015. *Beti Bachao Beti Padhao Scheme: Framework for Implementation*. Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. 2019. *Status Report on Beti Bachao Beti Padhao*. Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. 2020. *India Country Report for Beijing+25 Review*. Government of India.
- Monster India. 2022. *Monster Salary Index 2022*. Mumbai: Monster.com India.
- National Crime Records Bureau. 2022. *Crime in India 2021: Statistics*. Ministry of Home Affairs, Government of India.
- National Statistical Office. 2023. *Periodic Labour Force Survey Annual Report 2022-2023*. Ministry of Statistics and Programme Implementation, Government of India.
- Palshikar, Suhas. 2023. "The Politics of Delay in Women's Reservation." *Economic and Political Weekly* 58 (41): 8-10.
- Parliament of India. 2023. *The Constitution (One Hundred and Twenty-Eighth Amendment) Act, 2023 (Nari Shakti Vandan Adhiniyam)*. New Delhi: Government of India.
- Phillips, Anne. 1995. *The Politics of Presence*. Oxford: Oxford University Press.
- Pitkin, Hanna F. 1967. *The Concept of Representation*. Berkeley: University of

- California Press.
- Press Information Bureau. 2019. *Prime Minister Launches Pradhan Mantri Ujjwala Yojana 2.0*. Government of India.
- Press Information Bureau. 2023. *India Passes Historic Women's Reservation Bill*. Government of India.
- Rai, Shirin M. 2002. *Gender and the Political Economy of Development*. Cambridge: Polity Press.
- Reporters Without Borders. 2023. *World Press Freedom Index 2023*. Paris: RSF.
- United Nations. 1979. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. New York: United Nations.
- Varieties of Democracy Institute. 2021. *Democracy Report 2021: Autocratization Turns Viral*. Gothenburg: V-Dem Institute.
- World Economic Forum. 2023. *Global Gender Gap Report 2023*. Geneva: WEF.

